

**PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, RELIGIUSITAS,
DAN *POWER DISTANCE* TERHADAP KEPUTUSAN *WHISTLEBLOWING*
(Studi Kasus Pada Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Debora Ananda Krisnawan

(1905046011)

S1 AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Debora Ananda Krisnawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Debora Ananda Krisnawan

NIM : 1905046011

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas, dan *Power Distance* terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing* (Studi Kasus pada Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)"

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 September 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Tri Widyastuti Ningsih, S. E. I., M. Ak
NIP. 198710102019032017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Debora Ananda Krisnawan
NIM : 1905046011
Judul : **Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan *Power Distance* Terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing* (Studi Kasus Pada Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

27 September 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 September 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Rahman El-Junusi SE., MM.
NIP. 196911182000031001

Sekretaris Sidang

Tri Widyastuti Ningsih M. Ak.
NIP. 198710102019032017

Penguji Utama I

Riska Wijayanti M.H.
NIP. 198911012019032008



Penguji Utama II

Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si.
NIP: 198511062015031007

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Tri Widyastuti Ningsih M. Ak
NIP. 198710102019032017

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

(Q.S An-Nahl: 97)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Mummad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya. Dengan rasa bahagia dan syukur atas terselesaikan tugas akhir (skripsi) ini, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayah Ahmad Mafu'wun dan Ibu Suwarti yang sangat berjasa bagi penulis dan pendukung utama penulis, sehingga penulis bisa ditahap ini. Ayah dan Ibu yang selalu penulis sayangi dan cintai.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan restu kepadapenulis.
3. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menuntut ilmu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2023

Deklarator



Debora Ananda Krisnawan

NIM. 1905046011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang ada di dalam skripsi merupakan suatu hal yang penting dan sangat diperlukan pada penelitian ini, karena didalam naskah skripsi ini terdapat beberapa istilah yang menggunakan bahasa Arab dan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan pada penulisan naskah skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِىْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْىْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوْىْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ nazzala
 - اَلْبُرِّ al-bir

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

E. Ta' Marbutah

Ta' marbutah (تاء مربوطة) terdiri dari 2 kata, yaitu ta' (تاء) dan marbutah (مربوطة). ta' (تاء) adalah huruf ta', sedangkan marbutah (مربوطة) memiliki arti “terikat”. Ia merupakan bentuk isim maf'ul dari ربط yang artinya “mengikat”. Sesuai namanya, ia mempunyai bentuk yang terikat hampir menyerupai bulatan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku, religiusitas dan *power distance* terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang digunakan, penyebaran data dilakukan menggunakan bantuan *google form*. Responden dari penelitian ini adalah Staff Inspektorat Jawa Tengah sebanyak 102 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku, religiusitas dan *power distance* berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan whistleblowing, hal ini ditunjukkan dengan dengan jumlah nilai F_{hitung} sebesar 93.999 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2.69 yang mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan.

Kata kunci: Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas, Jarak Kekuasaan Dan Keputusan Melakukan *Whistleblowing*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of perceived behavior control, religiosity and power distance on the decision towards whistleblowing. This research uses primary data as the data source, data distribution is carried out using Google forms. The respondents of this research were 102 Central Java Inspectorate Staff. The research results show that perceived behavior control, religiosity and power distance have a significant influence on the decision towards whistleblowing, this is shown by the total F count value of 93.999 which is greater than the F table of 2.69 which indicates there is a significant simultaneous influence.

Keywords: *Perceived behavior control, Religiosity, Power Distance, decision towards whistleblowing*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang mana telah memberikan Hidayah dan Rahmatnya. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang **berjudul “Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, religiusitas, dan Power Distance Terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing* (Studi Kasus Terhadap Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya proses penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan lancar dikarenakan berkat bantuan pihak-pihak yang telah bersedia membantu dalam memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Atas dorongan dan motivasinya, penulis dengan rasa hormat ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang memberikan dedikasi yang sangat membanggakan.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si, Akt. CA, CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam studi.
4. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Sekretaris jurusan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam studi.
5. Ibu Dra. Hj. Nur Huda M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Tri Widyastuti Ningsih M. Ak.. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran serta waktu kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus UIN Walisongo Semarang
7. Kedua orang tua penulis Bapak M. Mafu'wun dan Ibu Suwarti yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar tanpa halangan apapun.

8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada penulis.
9. Sahabat sahabatku Tian Widarti, Putri Nurischa, Diana Resti, Febyana Rahmawati, Jhella Purnamasari, dan Zuliani Saputri. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga baru di Semarang. Terimakasih karena selalu ada di setiap moment di kehidupan penulis.
10. Teman yang sudah memberikan suport dan motivasi yang luar biasa.

Penulis masih menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demikesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kedepannya agar dapat menyusun skripsi lebih baik lagi.

Semarang, 18 September 2023

Penulis

Debora Ananda Krisnawan

NIM. 1905046011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
MOTTO	4
PERSEMBAHAN.....	5
DEKLARASI.....	6
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	7
ABSTRAK.....	10
ABSTRACT.....	11
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Bagi Peneliti.....	9
1.4.2 Bagi Akademisi	10
1.4.3 Bagi Pemerintahan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.2 Teori Kepemimpinan.....	13
2.3 Teori Akuntansi Perilaku (<i>Behavioral Accounting Theory</i>).....	16
2.4 Persepsi Kontrol Perilaku	17
2.4.1 Indikator Persepsi Kontrol Perilaku	18
2.5 Religiusitas.....	18
2.5.1 Indikator Religiusitas	20
2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas.....	21
2.6 <i>Power Distance</i>	22
2.6.1 Indikator <i>Power Distance</i>	23
2.7 <i>Whistleblowing</i>	23
2.7.1 Indikator Keputusan Melakukan <i>Whistleblowing</i>.....	27
2.8 Penelitian Terdahulu.....	28

2.9	Hipotesis.....	35
2.10	Kerangka Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis dan Sumber Data	39
3.1.1	Jenis Penelitian.....	39
3.1.2	Sumber Data.....	39
3.2	Populasi Dan Sampel.....	39
3.2.1	Populasi.....	39
3.2.2	Sampel.....	40
3.3	Metode Pengumpulan Data	41
3.4	Teknik Analisis Data	41
3.4.1	Analisis Deskriptif	41
3.4.2	Uji Instrumen Penelitian	42
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.4.4	Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.4.5	Uji Hipotesis	44
3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	48
4.1.1	Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	48
4.1.2	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	49
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	50
4.1.4	Tugas Jabatan Fungsional dan Struktural.....	51
4.1.5	Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional	52
4.2	Metode Analisis Data	53
4.2.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.3	Analisis Statistik Deskripif.....	55
4.4	Uji Instrumen.....	56
4.4.1	Uji Validitas	56
4.4.2	Uji Reliabilitas	57
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4.5.1	Uji Normalitas.....	58
4.5.2	Uji Multikolinearitas	60
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
4.7	Uji Statistik.....	64
4.7.1	Uji Parsial (Uji T)	64
4.7.2	Uji Simultan (Uji F)	65
4.7.3	Uji Koefisien Determinasi (Uji R)	66

4.8	Pembahasan dan Analisis Data.....	66
4.8.1	Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Melakukan <i>Whistleblowing</i>	66
4.8.2	Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Melakukan <i>Whistleblowing</i>	67
4.8.3	Pengaruh <i>Power Distance</i> Terhadap Keputusan Melakukan <i>Whistleblowing</i>	68
4.8.4	Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan <i>Power Distance</i> terhadap <i>Whistleblowing</i> Secara Simultan	69
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Keterbatasan.....	71
5.3	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Korupsi tiap Provinsi.....	5
Tabel 2. Data Kasus Korupsi tiap Provinsi.....	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4. Indikator Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	46
Tabel 5. Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	53
Tabel 6. Karakteristik Posisi Kerja Responden.....	54
Tabel 7. Karakteristik Lama Bekerja Responden.....	54
Tabel 8. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden.....	55
Tabel 9. Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 10. Hasil Uji Validitas.....	57
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	58
Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	62
Tabel 15. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
Tabel 16. Hasil Uji T.....	64
Tabel 17. Hasil Uji F.....	65
Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia.....	5
Gambar 2. Tiga Prediktor Utama yang Memengaruhi Intensi Melakukan Suatu Perilaku	11
Gambar 3. Kerangka Penelitian	38
Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	50
Gambar 5. Hasil Uji Histogram	59
Gambar 6. Hasil Normal P-Plot.....	60
Gambar 7. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Responden.....	77
Lampiran 2: Hasil Jawaban Angket... ..	81
Lampiran 3: Data Responden.....	87
Lampiran 4: Uji Validitas dan Realibilitas.....	89
Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik... ..	94
Lampiran 6: Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.....	97
Lampiran 7: Surat Izin Permohonan Penelitian... ..	98
Lampiran 8: Surat Balasan Izin Penelitian... ..	99
Lampiran 9: Dokumentasi... ..	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Signifikansi *whistleblowing* (pengadu kecurangan) dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan perbuatan salah yang terjadi dalam sebuah organisasi telah diakui oleh banyak badan pengatur di berbagai negara. Istilah *whistleblowing* menjadi lebih dikenal di Indonesia ketika terjadi kasus yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM) yang bernama Komisariss Jenderal Susno Duadji, yang mengungkapkan adanya praktik mafia pajak di dalam instansinya.¹ Kasus tersebut melibatkan seorang pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernama Gayus Tambunan dalam kasus-kasus yang terkait dengan pencucian uang dan korupsi. Saat ini, penerapan sistem *whistleblowing* menjadi salah satu upaya yang ditingkatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya di lingkup instansi pemerintah seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah, tetapi juga dalam setiap organisasi swasta.

Salah satu tujuan dari *whistleblowing* atau sistem pelaporan kecurangan ini adalah memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapa pun memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak dalam organisasi yang telah ditunjuk dan diberi mandat khusus untuk menerima pesan atau laporan tersebut, serta bertanggung jawab untuk mengirimkannya ke tahap berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Dalam konteks ini, penting bagi pimpinan tertinggi untuk memegang kewenangan dalam menerima laporan ini, sehingga proses selanjutnya dapat dilakukan secara hukum dan adil.

Whistleblowing, atau pelaporan pelanggaran, merupakan tindakan mengungkapkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, perilaku yang tidak etis atau bermoral, atau tindakan lain yang berpotensi merugikan organisasi dan pihak-pihak yang terkait atau memiliki kepentingan dengan organisasi tersebut.² Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh anggota organisasi, baik itu karyawan biasa atau pimpinan, kepada pimpinan organisasi atau entitas lain yang memiliki wewenang untuk mengambil langkah terkait pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini biasanya

¹ Parianti, N. P. I., Suartana, I. W., & Badera, I. D. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Dan Perilaku *Whistleblowing* Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4209-4236.

² Kumar, M., & Santoro, D. (2017). A Justification Of *Whistleblowing*. *Philosophy & Social Criticism*, 43, 669-684.

dilakukan secara rahasia atau bersifat *confidential*. Meskipun sistem pelaporan dan perlindungan untuk *whistleblowing* diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada

10 November 2008, belum banyak terlihat bagaimana perannya dalam mendorong munculnya *whistleblowing* dalam sektor pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan definisi *whistleblowing* sebagai seseorang yang melaporkan tindak pidana tertentu yang telah diketahuinya, bukan sebagai bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. *Whistleblowing* adalah tindakan mengungkapkan praktik ilegal, tidak etis, atau yang melanggar hukum yang terjadi dalam organisasi di mana mereka bekerja. Pengungkapan ini ditujukan kepada individu atau organisasi lain sehingga memungkinkan tindakan lebih lanjut dapat diambil.³ *Whistleblowing* juga dapat digambarkan sebagai tindakan mengungkapkan informasi dari sebuah entitas, baik itu organisasi swasta atau publik, dengan tujuan mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang berpotensi membahayakan masyarakat secara umum.⁴

Pentingnya peran *whistleblowing* telah mendorong beberapa lembaga di Indonesia untuk mengembangkan sistem pelaporan *whistleblowing* secara online. Contohnya, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) telah meluncurkan sistem pelaporan online ini. Hampir setiap kementerian juga menyediakan sarana bagi *whistleblowing*, dan dengan kemajuan teknologi digital, persyaratan dan laporan dari masyarakat dapat dengan cepat dan mudah didokumentasikan melalui sistem online ini. Masyarakat dapat mengakses website resmi kementerian untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan yang mencurigakan.⁵ Sementara ada lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab untuk melindungi *whistleblowing*, masalahnya adalah masih terdapat hambatan dan ketidakpastian terkait perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblowing*. Saat ini, dasar hukum yang ada belum cukup kuat untuk memberikan jaminan yang tegas terhadap keamanan *whistleblowing*. Selain itu, undang-undang yang berlaku saat ini masih bersifat umum dalam pengaturan terhadap saksi, pelapor, dan korban, sehingga tidak memberikan perlindungan yang spesifik atau komprehensif kepada para *whistleblowing*.⁶

Hukum yang membahas mengenai *whistleblowing* salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. Faktanya, belum ada pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap

³ Miceli, M. P., Near, J. P., Dan Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-Blowing In Organizations*. New York: Routledge

⁴ Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Pengaruh Sikap Ke Arah Perilaku, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Atas Perilaku Terhadap Niat Dan Perilaku *Whistleblowing* Cpns (The Influence Of Attitude Toward The Behavior, Subjective Norms, And Perceived Behavioral Kontrol On *Whistleblowing* Intention And Behavior Of Cpns). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4, 63-84.

⁵ Kompas.Com, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblowing*",
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/12/24/02000031/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Whistleblowing>.
 Penulis : Issha Harruma

⁶ UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

whistleblowing, hal tersebut hanya merupakan kesepakatan bersama di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *whistleblowing*, hal ini karena Hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai *whistleblowing*. Padahal *whistleblowing* memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan⁷.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Cirebon, yang berhasil diungkap oleh seorang *whistleblowing*. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 818 juta. Awalnya, Nurhayati, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, adalah orang yang membongkar kasus tersebut. Namun, setelah memberikan bantuan kepada pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus selama hampir dua tahun, Nurhayati juga dijadikan tersangka pada akhir 2021. Keputusan ini memicu kontroversi, mengingat statusnya sebagai pelapor. Kasus korupsi yang melibatkan Supriyadi, yang dilaporkan oleh Nurhayati, bahkan belum sampai ke tahap persidangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor seharusnya tidak dapat dituntut hukum atas laporan yang diajukannya, kecuali jika terbukti bahwa pelaporan tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik.⁸ Undang-undang ini juga mengatur bahwa jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor, maka tuntutan tersebut harus ditunda hingga kasus yang dilaporkan oleh pelapor diselesaikan di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus Nurhayati akhirnya dihentikan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) pada awal Maret 2022. Mantan Kepala Desa Citemu, Supriyadi, pada bulan Juli lalu dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah dikurangi masa tahanan, serta denda sebesar Rp 200 juta yang dapat diganti dengan tiga bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 818.722.500. Terhadap vonis ini, baik Supriyadi maupun jaksa penuntut umum memutuskan untuk mengajukan banding. Oleh karena itu, kasus ini masih dalam proses pengadilan hingga saat ini⁹. Melihat kurangnya keterbukaan dalam pencatatan keuangan dan masalah perlindungan hukum yang masih belum memadai, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam dan mendalami permasalahan ini.

Di Indonesia sendiri, kasus korupsi mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stagnan. Menurut data yang diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 579 kasus

⁷ Setiawan, G. N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblowing* Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 332-336.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

⁹ Mulyadi, Lilik. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.

korupsi yang ditindaklanjuti di Indonesia selama tahun 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 8,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatat 533 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut, terdapat 1.396 individu yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di dalam negeri, yang mengalami peningkatan sebesar 19,01% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi pada tahun 2022, dengan jumlah sebanyak 405 kasus. Kejaksaan Agung juga menetapkan 909 orang sebagai tersangka suap pada tahun yang sama. Sementara itu, Polri menangani 138 kasus korupsi dengan melibatkan 307 tersangka. Sedangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 36 kasus dengan melibatkan 150 tersangka. Pada tahun 2022, sektor desa mencatat jumlah kasus korupsi tertinggi, yaitu sebanyak 155 kasus. Angka ini setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum selama tahun tersebut. Selain sektor desa, korupsi juga banyak terjadi di sektor utilitas dengan 88 kasus. Sektor pemerintahan menyusul dengan mencatat 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sementara itu, sektor pendidikan mencatat 40 kasus korupsi pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan memiliki jumlah yang sama, yaitu 35 kasus.¹⁰

Gambar 1. Grafik Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), selama tahun 2022 terdapat 5 daerah yang melaporkan tindak korupsi kepada KPK. Laporan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 585 laporan. Urutan kedua ditempati Jawa Barat dengan 429 aduan, dan disusul Sumatera Utara dengan 370 aduan, Jawa Timur 357 aduan dan Jawa Tengah 237 aduan. Adapula pada periode 2004-2021, KPK dan Polda menyatakan 10 Provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak.

Tabel 1. Data Kasus Korupsi tiap Provinsi

Provinsi	Jumlah kasus korupsi
Jawa Barat	115 Kasus
Jawa Timur	103 Kasus
Sumatera Utara	79 Kasus

¹⁰ Indonesian Corruption Watch (Antikorupsi.Org/Id), Diakses Pada 8 Agustus 2023.

Riau dan Kepulauan Riau	68 Kasus
DKI Jakarta	64 Kasus
Sumatera Selatan	55 Kasus
Jawa Tengah	51 Kasus
Lampung	34 Kasus
Kalimantan Timur	28 Kasus
Banten	27 Kasus

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel 2. Data Kasus Korupsi tiap Provinsi

Provinsi	Jumlah kasus korupsi
Sulawesi Tenggara	28 Kasus
Kalimantan Barat	28 Kasus
Bengkulu	25 Kasus
Aceh	21 Kasus
Riau	21 Kasus
Kalimantan Timur	18 Kasus
Jawa Timur	18 Kasus
Sulawesi Selatan	17 Kasus
Jawa Tengah	17 Kasus
Papua	16 Kasus

Sumber: dokumen palpos.id

Selain upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda, Inspektorat Kabupaten Semarang sendiri telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp 505,7 juta hasil dari hasil pemeriksaan selama periode 2020-2021. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 413,45 juta telah dikembalikan ke kas negara, sementara sisanya sebesar Rp 92,25 juta dikembalikan ke kas daerah. Jumlah tersebut berasal dari hasil pemeriksaan sebanyak 139 objek pemeriksaan (obrik) yang dilakukan pada tahun 2020 dan 139 pemeriksaan hingga Oktober 2021. Inspektorat Kabupaten Semarang juga melaporkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 80 persen temuan dari hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti. Sedangkan pada semester pertama tahun ini, sekitar 61,5 persen dari temuan hasil pemeriksaan telah mendapatkan tindak lanjut. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2021 juga telah menyelesaikan dua rekomendasi hasil pemeriksaan mereka.¹¹

Terus menerus nya kecurangan dalam pemerintahan selama beberapa dekade terakhir telah menimbulkan kekhawatiran publik yang serius terhadap integritas dan peran auditor pemerintahan. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan manipulatif dalam pemerintahan telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas keuangan dan kebijakan publik. Kejadian-kejadian ini menciptakan keraguan tentang apakah auditor pemerintahan memiliki kecukupan independensi dan otonomi untuk mengungkapkan dan mengatasi

¹¹ Jatengprov.Go.Id, Diunggah Oleh Yandip Prov Jateng, 11 November.

kasus-kasus kecurangan yang terjadi. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan reformasi dan transparansi dalam sistem audit pemerintahan. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan bahwa auditor pemerintahan memiliki alat dan wewenang yang cukup untuk melakukan tugas mereka secara efektif dan tanpa tekanan eksternal.

Melihat kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia khususnya pada Kota Semarang, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya pelaporan kecurangan terhadap pihak berwenang salah satunya Inspektorat. Dikutip dari penelitian Natawibawa, Irianto G, dkk. beberapa faktor individu yang mempengaruhi niat *whistleblowing* dengan menggunakan teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen, faktor-faktor tersebut persepsi kontrol perilaku, religiusitas, dan *Power Distance*. Park dan Blenkinsopp juga menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* internal, tetapi tidak berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* eksternal¹². Namun, dalam studi yang berjudul "Pengaruh Sikap Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi," penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana Saud memberikan temuan menarik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terkait dengan kontrol perilaku tidak tampak memberikan dampak positif terhadap niat individu untuk melaporkan pelanggaran baik secara internal maupun eksternal. Akan tetapi, ketika variabel persepsi dukungan organisasi digunakan sebagai faktor pemoderasi dalam menghubungkan persepsi kontrol perilaku dengan niat melaporkan pelanggaran, hasilnya mengungkapkan bahwa persepsi dukungan organisasi muncul sebagai faktor yang memperkuat pengaruh dari persepsi kontrol perilaku terhadap niat melaporkan pelanggaran, baik secara internal maupun eksternal.¹³

Menurut Albert Puni, dalam penelitiannya yang berjudul *Power Distance Culture And Whistleblowing Intentions: The Moderating Effect Of Gender, Power Distance* berpengaruh terhadap keinginan melakukan *whistleblowing*¹⁴. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Florencia Pangestu, hasil dari penelitian mengatakan bahwa *Power Distance* tidak berpengaruh terhadap keputusan *whistleblowing* yang mana hal tersebut berlawanan dengan hasil penelitian milik Albert Puni¹⁵. Penelitian lain juga dilakukan oleh Hesti Eka Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh

¹² Natawibawa, I. W. Y., Irianto G., & Roekhudin, R. (2018). Theory Of Reasoned Action Sebagai Prediktor Whistleblowing Intention Pengelola Keuangandi Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 310-319.

¹³ Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 209-219.

¹⁴ Puni, A., & Hilton, S. K. (2020). *Power Distance Culture And Whistleblowing Intentions: The Moderating Effect Of Gender*. *International Journal Of Ethics And Systems*, 36(2), 217-234.

¹⁵ Pangestu, F., & Rahajeng, D. K. (2020). The Effect Of *Power Distance*, Moral Intensity, And Professional Commitment On Whistleblowing Decisions. *Journal Of Indonesian Economy And Business: Jieb.*, 35(2), 144-162.

Sifat Machiavellian Dan *Power Distance* Terhadap Keputusan *Whistleblowing*, yang mana menyatakan bahwa *Power Distance* memiliki pengaruh positif dalam keputusan *whistleblowing*¹⁶. Selain Perspektif kontrol perilaku dan *Power Distance*, menurut Sri Ayem dan Rumdoni, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi, Religiusitas, Dan Gender Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)” hal yang mempengaruhi keputusan *whistleblowing* adalah Religiusitas, dalam penelitiannya variabel Religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*.¹⁷

Whistleblowing memiliki peran penting dalam organisasi dan perusahaan. Selain memantau kinerja, karyawan juga memiliki kemampuan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja mereka melalui sistem *whistleblowing* yang dapat menghubungkannya langsung ke atasan. Atasan kemudian akan menerima, menilai, dan menindaklanjuti laporan tersebut. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya, dan mereka akan diberikan jaminan keamanan serta mungkin diberikan penghargaan atas keberaniannya melaporkan pelanggaran. Dengan kata lain, pelapor tidak akan mengalami kerugian apa pun. Sistem *whistleblowing* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai pemerintahan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah fraud dan korupsi dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya. Ini berarti bahwa *whistleblowing* dapat mengurangi budaya diam dan mendorong terciptanya budaya "kejujuran dan keterbukaan." Seperti yang dijelaskan oleh Yunus dalam Vredy, sistem *whistleblowing* merupakan salah satu metode yang dapat mendukung penegakan etika dalam perusahaan dan mendorong perilaku etis dari para karyawan, serta menjadi alat untuk mencegah tindakan yang tidak etis dan perilaku curang yang dapat merugikan negara.¹⁸

Alasan peneliti memilih staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini karena staff inspektorat dianggap berpeluang sebagai *whistleblowing* yang juga merupakan SDM paling dekat dengan berbagai tindak kecurangan dan menduduki kedudukan terbaik dalam melihat praktik ilegal yang terjadi. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah dengan diterapkannya *whistleblowing* dalam lingkungan kerja ini nantinya akan mempengaruhi para pegawai untuk melaporkan tindak kecurangan/ fraud yang terjadi di lingkungan kerjanya.

¹⁶ Pratiwi, H. E., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Sifat Machiavellian Dan *Power Distance* Terhadap Keputusan *Whistleblowing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2185-2199.

¹⁷ Ayem, S. (2021). Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi, Religiusitas, Dan Gender Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(2), 150-164.

¹⁸ Paradhatu, L. F., & Pustikaningsih, A. (2019). Pengaruh Sikap, Tingkat Keseriusan Masalah, Dan Perilaku Etis Terhadap Minat Whistle-Blowing (Studi Kasus Pada Karyawan Pt Angkasa Pura 1

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas, Dan *Power Distance* Terhadap Keputusan *Whistleblowing* (Studi Kasus pada Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*?
2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*?
3. Apakah power distance berpengaruh signifikan terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*?
4. Apakah persepsi kontrol perilaku, religiusitas dan power distance berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*.
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *power distance* terhadap terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*.
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku, religiusitas, dan power distance terhadap terhadap keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* secara simultan (bersama-sama).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat menambah pengetahuan mengenai keputusan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharap memperkaya kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan tindak pelanggaran khususnya untuk memahami teori mengenai *whistleblowing*.

1.4.3 Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan segala bentuk tindak pelanggaran/kecurangan.

BAB II

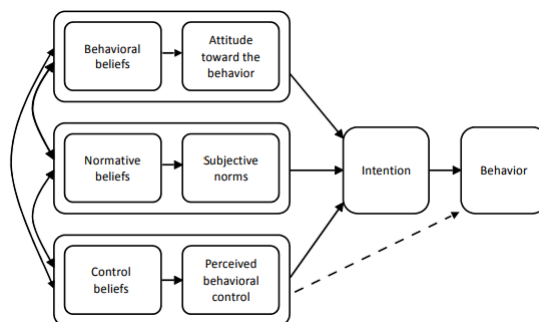
LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana merupakan evolusi dan penyempurnaan dari teori sebelumnya yang dikenal dengan Teori Tindakan yang Diberi Alasan (Theory of Reasoned Action), yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1991.¹⁹ Menurut penafsiran Ajzen, Teori Tindakan yang Diberi Alasan (Theory of Reasoned Action, TRA) hanya dapat diterapkan pada perilaku yang benar-benar dapat dikendalikan oleh individu tersebut. Teori ini tidak cocok untuk menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali individu, karena ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, dalam Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior, TPB), Ajzen memasukkan satu faktor tambahan yang dikenal sebagai kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavior control). TPB digunakan untuk memproyeksikan perilaku individu, dan teori ini mengandalkan dua asumsi utama dalam mengevaluasi niat individu terkait perilaku tersebut, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) dan norma subjektif (*subjective norm*).²⁰

Ada tiga faktor utama yang memengaruhi niat individu untuk melakukan suatu perilaku, yakni sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control).

Gambar 2. Tiga Prediktor Utama yang Memengaruhi Intensi Individu untuk Melakukan Suatu Perilaku



Sumber: Ajzen, 2005: hlm 126

¹⁹ Ajzen, I., & Fishbein, M., (1975), "Belief, Attitude, Intention, And Behavior: An Introduction To Theory And Research", 129-385, Addison-Wesley, Reading, Ma.

²⁰ Wikamorys, Dian Anggraini., Thini Nurul Rochmach., 2017, "Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Untuk Melakukan Operasi Katarak", Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

1. Sikap terhadap suatu perilaku (*Attitude toward the behavior*)

Sikap adalah faktor dalam diri seseorang yang berkaitan dengan respons positif atau negatif terhadap penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Sikap ini mencakup sejauh mana individu menilai dan mengevaluasi suatu perilaku, baik itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, yang dapat memengaruhi niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Sikap didasarkan pada dua elemen utama. Pertama, ada Keyakinan Perilaku (*Behavioral Belief*), yang merujuk pada keyakinan individu tentang hasil dari perilaku yang akan dilakukan, seperti konsekuensi positif atau negatif dari perilaku tersebut. Kedua, ada Evaluasi Tentang Kepentingan (*Evaluation of Importance*), yang berkaitan dengan penilaian individu terhadap hasil dari perilaku yang akan dilakukan. Hal ini akan memengaruhi respons positif atau negatif terhadap sejauh mana pentingnya perilaku tersebut, berdasarkan pertimbangan keyakinan tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, jika seseorang meyakini bahwa melakukan suatu perilaku akan membawa manfaat (konsekuensi positif) bagi dirinya atau organisasinya, maka individu tersebut akan merespons positif terhadap pentingnya perilaku tersebut dan akan mendorong niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa suatu perilaku tidak akan membawa manfaat (konsekuensi negatif), maka mereka akan memberikan respons negatif terhadap pentingnya perilaku tersebut dan akan berkesimpulan bahwa perilaku tersebut tidak penting untuk dilakukan. Hal ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan niat untuk melakukan perilaku tersebut.

2. Norma Subjektif (*Subjektif Norm*)

Norma subjektif adalah persepsi individu mengenai pandangan orang lain apakah mereka mendukung atau tidak mendukung individu tersebut dalam melakukan suatu tindakan. Konsep norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu. Seorang individu cenderung akan melakukan tindakan jika mereka merasa didukung oleh orang lain yang setuju dengan tindakan tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa bahwa orang lain tidak setuju dengan tindakan tersebut, mereka cenderung enggan melakukannya.

3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Kontrol*)

Persepsi kontrol perilaku adalah pandangan individu tentang sejauh mana tindakan tertentu mudah atau sulit untuk dilakukan. Semakin besar persepsi kontrol perilaku, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Persepsi kontrol perilaku berdasarkan dua elemen utama. Pertama, ada Keyakinan Kontrol (*Control Belief*), yaitu keyakinan individu tentang ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung

atau menghambat tindakan yang akan dilakukan. Kedua, ada Kekuatan Persepsi (*Perceived Power*), yang berkaitan dengan bagaimana individu melihat sejauh mana mereka merasa mudah atau sulit untuk melaksanakan tindakan tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat tindakan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang meyakini bahwa faktor-faktor yang mendukung saat melakukan tindakan lebih dominan daripada faktor-faktor yang menghambatnya, maka mereka akan merasa bahwa mereka memiliki kemudahan dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Penggunaan *Theory of Planned Behavior* (Teori Perencanaan Perilaku) dipilih karena teori ini mampu mengungkap keyakinan individu terkait dengan kontrol atas hasil dari perilaku yang akan dilakukan. Ini memungkinkan untuk membedakan antara perilaku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh individu. Dalam konteks ini, teori digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh perilaku yang direncanakan oleh staf di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan implikasi sebelum melaporkan tindakan kecurangan yang mereka ketahui.

2.2 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seni untuk memotivasi dan memengaruhi sekelompok individu agar bekerja bersama mencapai tujuan yang sama. Peran seorang pemimpin melibatkan berbagai fungsi seperti memberikan konsultasi, memberikan bimbingan, memberikan motivasi, dan memberikan nasehat kepada anggota kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ini sejalan dengan pandangan lain yang menggambarkan kepemimpinan sebagai kemampuan memengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan tujuan mencapai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Kepemimpinan juga dapat dijelaskan sebagai cara di mana seorang pemimpin memengaruhi perilaku anggota timnya sehingga mereka mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang individu mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain, baik itu individu maupun kelompok, menuju pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks kepemimpinan, terdapat unsur-unsur seperti pemimpin, anggota tim yang dipimpin, tujuan, aktivitas, interaksi, dan pengaruh. Gaya kepemimpinan juga mencerminkan keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan anggota timnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

Dalam konteks tersebut, gaya kepemimpinan merujuk pada pola perilaku dan strategi yang

²¹ Sanjaya, R. D., Pratami, L. A., Rizky, M., Permata, P. M., & Rahmayanti, R. (2022). The Effect Of Delegative Leadership Style and Non-Physical Work Environment On Employee Performance On Cv Wirasandi.

²² Ndruru, Y. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Tanimas Soap Industri Medan (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).

digunakan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan ini merupakan hasil dari kombinasi dari berbagai faktor seperti pandangan hidup, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering digunakan oleh seorang pemimpin dalam upaya mempengaruhi kinerja anggota timnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak hanya diperlukan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, tetapi juga diperlukan kerangka kerja yang terdiri dari regulasi dan pedoman, dinamika kelompok yang melibatkan dukungan sosial dan emosional, fokus pada tugas, komitmen dan kompetensi anggota tim, serta hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota tim, semuanya harus sejalan dengan tujuan organisasi.²³ Definisi alternatif tentang gaya kepemimpinan mencakup serangkaian karakteristik yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi anggota timnya guna mencapai tujuan organisasi. Dalam kata lain, gaya kepemimpinan menggambarkan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering digunakan oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan sendiri dapat dijelaskan sebagai upaya untuk memengaruhi individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi. Menemukan pemimpin yang tepat untuk masa depan adalah suatu keharusan dalam menjaga kelangsungan perusahaan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan tren, perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan cepat saat ini. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki tingkat empati yang tinggi dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau ras.²⁴

Teori Gaya Kepemimpinan dibagi menjadi tiga, gaya kepemimpinan bersumber dari beberapa teori, yaitu²⁵:

1. Teori Bakat.

Teori ini berusaha mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat tertentu, baik itu sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual, yang membedakan seorang pemimpin dari seseorang yang bukan pemimpin. Dalam konteks ini, bakat diartikan sebagai kecenderungan yang dapat diperkirakan, yang mengarahkan perilaku individu untuk bertindak secara unik dan konsisten.

2. Teori Perilaku.

Teori perilaku kepemimpinan adalah kumpulan teori yang menekankan bahwa perilaku khusus membedakan seorang pemimpin dari yang bukan pemimpin. Sebagian besar perilaku kepemimpinan, seperti yang diuraikan oleh pandangan bawahan, dapat

²³ Ryan, J. C., & Tipu, S. A. (2013). Leadership Effects On Innovation Propensity: A Two-Factor Full Range Leadership Model. *Journal Of Business Research*, 66(10), 2116-2129.

²⁴ Malkan, M., Adam, Y., Syafaat, M., & Sofyan, S. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Mandiri Kcp Palu Imam Bonjol. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 106-121.

²⁵ Andayani, Dwi. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bpr Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Islam. *Inovatif*. 4 (1): 2598-3172.

dikelompokkan menjadi dua kategori utama: struktur inisiatif (*initiating structure*) dan perhatian (*consideration*). Struktur inisiatif berfokus pada aspek pengorganisasian dan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan, sementara perhatian mengacu pada perhatian terhadap perasaan dan kesejahteraan para bawahan.

3. Teori Situasional.

Gaya kepemimpinan situasional yang dikaitkan dengan tugas dan hubungan mengacu pada konsep bahwa seorang manajer atau pemimpin akan mengadopsi gaya kepemimpinan tertentu berdasarkan pada apa yang dianggap paling penting dalam situasi tertentu, apakah itu fokus pada tugas yang harus diselesaikan atau hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Dalam beberapa situasi, pemimpin mungkin lebih memprioritaskan tugas dan mencurahkan perhatian utama pada pencapaian tujuan, sementara dalam situasi lain, pemimpin mungkin lebih fokus pada membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan anggota tim.

Berikut adalah beberapa Indikator Gaya Kepemimpinan Indikator kepemimpinan, yaitu²⁶:

1. Kemampuan mengarahkan.

Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk membimbing pegawainya sehingga sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

2. Membimbing.

Tidak hanya memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat yang sesuai, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk memastikan kelancaran pelaksanaan visi dan misi perusahaan.

3. Mempengaruhi orang lain.

Mempengaruhi dengan cara yang positif dan bukan dengan melakukan indoktrinasi terhadap para pegawai agar mereka bekerja sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan.

4. Sikap dan tanggung jawab.

Hal ini sangat penting karena sikap dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah hal yang pertama kali diamati oleh orang lain. Kemampuan pemimpin untuk bersikap positif, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan dengan cepat dalam berbagai situasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memimpin dengan efektif.

5. Kepentingan bersama.

²⁶ Aliyaningsih, D. (2020). Peran Kepemimpinan, *Power Distance* Dan Team Work Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Madiun Umbul Square (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Alasan digunakannya Teori Kepemimpinan adalah karena teori ini mampu mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap hubungan dan gaya kepemimpinan atasan dalam memberi pengaruh. Dalam hal ini mengukur tentang seberapa besar pengaruh jabatan yang lebih tinggi yang terjadi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan implikasi sebelum melaporkan sebuah tindakan kecurangan yang diketahui oleh staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang berikatan dengan teori ini adalah *Power Distance*.

2.3 Teori Akuntansi Perilaku (*Behavioral Accounting Theory*)

Akuntansi keperilakuan merupakan salah satu bidang dalam akuntansi yang saat ini semakin mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Lingkup akuntansi keperilakuan jauh lebih luas dibandingkan dengan akuntansi tradisional yang hanya berfokus pada proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Pada akuntansi keperilakuan, fokus utamanya adalah pada perilaku manusia dan bagaimana perilaku tersebut berkaitan dengan perancangan, penyusunan, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan interaksi kompleks antara perilaku individu dalam konteks sistem akuntansi, mengakui peran penting aspek sosial dalam dinamika organisasi, dan memberikan tambahan informasi yang sangat berharga dalam penyajian informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan.²⁷

Teori akuntansi keperilakuan adalah kerangka konseptual yang mempelajari hubungan antara perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks proses informasi akuntansi dan pengauditan. Tujuan dasar dari teori ini adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan akuntansi. Lingkup teori akuntansi keperilakuan mencakup pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, serta metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari teori akuntansi keperilakuan, organisasi dapat lebih baik memahami dan mengelola perilaku individu dan kelompok yang mempengaruhi proses informasi akuntansi, dengan tujuan akhir meningkatkan efektivitas sistem akuntansi mereka.²⁸

Teori ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena ia memeriksa sikap dan persepsi kontrol

²⁷ Supriyono, R.A., 1950- (Penulis); Mash (Korektor). (2017; © 2017). Akuntansi Keperilakuan / Penulis, R.A. Supriyono; Korektor, Mash. Yogyakarta:: Gadjah Mada University Press,.

²⁸ Arfan Ikhsan, 1979-; Herkulanus Bambang Suprasto. (2008.). Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma / Arfan Ikhsan, Herkulanus Bambang Suprasto. Yogyakarta :: Graha Ilmu,.

perilaku yang dapat memengaruhi niat dari staf Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan whistleblowing. Niat ini kemudian dapat memengaruhi perilaku sebenarnya dari auditor, khususnya dalam konteks proses pembuatan informasi akuntansi yang mereka hasilkan melalui pemeriksaan laporan keuangan lembaga atau instansi pemerintah. Dengan demikian, teori akuntansi keperilakuan membantu dalam memahami faktor-faktor psikologis dan perilaku yang dapat memengaruhi keputusan untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis dalam lingkungan audit dan akuntansi.

2.4 Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku mencerminkan individuSs kemampuan untuk mengendalikan tindakan mereka. Ketika seseorang merasa bahwa ada banyak faktor yang mendukung dan sedikit faktor yang menghambat tindakan tertentu, mereka akan merasa memiliki kontrol yang kuat atas perilaku tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa ada banyak hal yang menghambat dan sedikit yang mendukung perilaku tersebut, mereka akan cenderung merasa sulit untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, persepsi kontrol perilaku memainkan peran penting dalam membentuk niat dan tindakan individu, karena mereka cenderung lebih mungkin untuk melaksanakan perilaku yang mereka rasakan dapat mereka kendalikan.²⁹

Persepsi kontrol perilaku merupakan sejauh mana individu merasa memiliki kendali terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan perilaku tertentu. Keyakinan kontrol adalah tentang keyakinan individu terhadap faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan perilaku tersebut. Perceived Behavioral Control (PBC) mencerminkan kemampuan individu untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan, dengan asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka. Dengan kata lain, PBC menggambarkan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku tertentu, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mungkin memengaruhi tindakan mereka.³⁰

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi kontrol perilaku adalah pandangan individu terhadap sejauh mana mereka memiliki kendali atas perilaku tertentu. Ini mencakup keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat memudahkan atau menghambat pelaksanaan perilaku tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa persepsi kontrol perilaku secara erat terkait dengan Teori Perilaku Terencana karya Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku, dan kesadaran individu terhadap tindakan

²⁹ Najela, Nadia Tettyavi (2019) Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Sebagai Penentu Niat Beli Ulang Pada Konsumen Klinik Kecantikan Auraku Skin Solution Kota Cimahi. Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia.

³⁰ Ajzen, Icek., Brown, C. Dan Carvajal, F, 2004, "Explaining The Discrepancy Between Intentions And Actions: The Case Of Hypothetical Bias In Contingent Valuation."University Of Massachusetts. Amherst.

tersebut memainkan peran penting dalam pembentukan niat dan pelaksanaan perilaku tersebut.

2.4.1 Indikator Persepsi Kontrol Perilaku

Indikator persepsi kontrol perilaku terhadap keputusan melakukan *whistleblowing* ada 4 yaitu³¹ :

1. Tempat kerja mengabaikan laporan korupsi atau kecurangan yang terjadi.
2. Pelapor kecurangan menghadapi banyak kesulitan dalam proses pelaporan korupsi.
3. Laporan adanya kecurangan tidak akan membuat perbedaan apapun di tempat kerja
4. Pelapor akan menghadapi banyak kesulitan dalam proses pelaporan korupsi.

2.5 Religiusitas

Penjelasan tentang asal-usul kata "religiusitas" adalah bahwa kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu "*religio*," yang akar katanya adalah "*religare*," yang memiliki arti "mengikat." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "religiusitas" diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang merujuk pada keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yaitu kekuatan yang adikodrati.³² Penjelasan tersebut membedakan antara agama atau religi dan religiusitas. Agama atau religi mengacu pada aspek formal yang terkait dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal ini bertujuan untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Sementara itu, religiusitas mengacu pada aspek yang dihayati oleh individu, yang mencakup pengalaman pribadi, keyakinan, dan perasaan spiritual yang mendalam terkait dengan kepercayaan dan praktik agama atau religi yang dianutnya.

Dengan kata lain, religiusitas mencerminkan tingkat keterlibatan spiritual dan penghayatan individu terhadap agama atau religi yang dianutnya.³³ Religiusitas melibatkan unsur internalisasi agama dalam diri individu, yang mengindikasikan bahwa religiusitas tidak hanya terbatas pada aspek formal atau eksternal, tetapi juga mencakup dimensi internal atau personal dalam kepercayaan dan praktik agama. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa religiusitas dapat diukur dengan mempertimbangkan kehadiran lembaga keagamaan dan sejauh mana agama memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Hal ini mencerminkan bahwa religiusitas dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas sehari-hari dan hubungan dengan lembaga

³¹ Rahayu, W. N. (2018). Pengaruh Sikap, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Niat Whistleblowing Eksternal-Internal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (BachelorSs Thesis, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).

³² Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-4 (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), 69.

³³ Hidayah Marsal, 2008.

keagamaan.³⁴

Religiusitas mencerminkan sejauh mana individu mempraktikkan dan mematuhi ajaran agamanya dalam tindakan dan perilaku sehari-hari sesuai dengan tingkat ketaatannya kepada agama tersebut.³⁵ Dalam sudut pandang lain, religiusitas didefinisikan sebagai sistem yang kompleks yang mencakup kepercayaan, keyakinan, sikap, serta praktik dan upacara keagamaan yang menghubungkan individu dengan dimensi keberagamaan atau sesuatu yang bersifat keagamaan.³⁶ Religiusitas lebih bersifat personal dan merupakan ekspresi individu terhadap agamanya. Agama, di sisi lain, mencakup ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan praktik-praktik terkait Tuhan atau kekuatan adikodrati. Maka dapat disimpulkan bahwa, tingkat religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang mempraktikkan dan menghayati ajaran-ajaran agamanya melalui perilaku dan keyakinannya.³⁷

Religiusitas dapat digambarkan sebagai perasaan dan pengalaman individu yang merasa memiliki hubungan dengan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri dianggap sebagai kebenaran yang mendasar. Sementara menurut Shihab, religiusitas adalah hubungan antara makhluk dan Penciptanya, tercermin dalam sikap batin individu, ibadah yang dijalankan, serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, religiusitas mencakup dimensi spiritual dan praktis dalam kehidupan individu.³⁸

Aspek religiusitas yang paling signifikan adalah kemampuan individu untuk merasakan dan mengalami secara batin tentang Tuhan, hari akhir, dan komponen-komponen agama lainnya. Dengan kata lain, religiusitas dalam konteks Islam adalah konsep yang mencakup kedalaman pengalaman dan hubungan spiritual seseorang dengan aspek-aspek agamanya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini menunjukkan pentingnya dimensi spiritual dalam praktik dan keyakinan agama dalam Islam.³⁹

Religiusitas Islami merupakan tingkat kesadaran individu terhadap Allah yang dipahami dalam konteks pandangan tauhid Islam. Ini melibatkan perilaku yang sesuai dengan kesadaran tersebut, serta tingkat manifestasi dari kesadaran akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berakar pada ajaran Islam Sunni, yang menekankan pentingnya kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan praktik agama.⁴⁰

³⁴ Firmansyah, Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas Pasien Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kesehatan, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 13.

³⁵ Rakhmat, Jalaludin. (2015). Psikologi Komunikasi. Bandung: Pt. Remaja. Rosdakarya Offset.

³⁶ Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 130

³⁷ Pruyser, P. W. (1976). The Minister As Diagnostician: Personal Problems In Pastoral Perspective.

³⁸ Fidayanti, Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam (Bandung: Psymphatic, Juni 2015), Vol. 2, No. 2, 199.

³⁹ Ros Mayasari, Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan (Al-Munzir: November 2014), Vol. 7, No. 2, 85

⁴⁰ Yuni Fitriani, Religiusitas Islam Dan Kerendahan Hati Dengan Pemanfaatan Pada Mahasiswa (Riau: Jurnal Psikologi,

Hal tersebut mencakup pengetahuan agama, keyakinan agama, pengalaman ritual agama, perilaku moral yang sesuai dengan agama, dan sikap sosial yang berkaitan dengan agama. Dalam Islam, religiusitas mencerminkan pengalaman dalam tiga dimensi utama: aqidah (keyakinan), syariah (hukum Islam), dan akhlak (etika dan perilaku baik). Dalam ungkapan yang lebih singkat, ini dapat dirangkum sebagai iman, islam, dan ihsan, yang merujuk pada aspek keyakinan, praktik keagamaan, dan kebaikan moral. Bila semua unsur itu telah di miliki seseorang maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya.⁴¹

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat At-Taubah :

وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا
مِّنَّا لهُدًى وَبُحُرًا لَّيَالِي
الْأَيُّمِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابِ اللَّهِ هَادُونَ

Artinya: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai” (QS. At-Taubah: 33)⁴².

2.5.1 Indikator Religiusitas

Ajaran agama tidak hanya memberikan landasan iman dan kepercayaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kelompok dan solidaritas di antara penganutnya.

Berikut adalah Indikator religiusitas, yaitu: ⁴³

1. Mencakup keyakinan bahwa agama memberikan jawaban tentang makna kehidupan
2. Meluangkan waktu pribadi untuk aktivitas keagamaan, meyakini bahwa agama memengaruhi kehidupan sehari-hari
3. Menginvestasikan waktu untuk memahami agama lebih dalam, dan membaca literatur agama.

Orang yang memiliki tingkat religiusitas intrapersonal yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap norma moral dan cenderung menjauhi perilaku curang atau penipuan. Ini menggambarkan bagaimana agama dapat memengaruhi perilaku dan moral individu.

Desember 2018), Vol. 14, No. 2, 167

⁴¹ Dradjat, Ilmu., 132.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an (Semarang: Al-Waah, 2004), 259

⁴³ Rodiansah, A. H. (2020). Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).

⁴⁴ Syamsu Yusuf, Psikologi Belajar Agama (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2003), 13

⁴⁵ Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama, 2010), 911.

memberikan pendidikan dan pelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku peserta didiknya. Selain itu, peran keteladanan guru sebagai pendidik sangat penting karena mereka berkontribusi dalam menanamkan kebiasaan yang baik pada peserta didik. Hal ini merupakan bagian integral dari pembentukan moral dan perkembangan perilaku keberagamaan individu.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama memiliki potensi besar untuk memengaruhi tingkat keberagamaan seseorang. Melalui berbagai upaya pembinaan dan bimbingan agama di masyarakat, seperti ceramah agama, pengajian, serta contoh yang baik dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, individu dapat terbimbing dan terinspirasi untuk mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat berkontribusi dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang agar lebih selaras dengan nilai-nilai agama yang telah dianutnya, baik yang dipelajari melalui lingkungan keluarga maupun pendidikan di sekolah.

2.6 *Power Distance*

Power Distance adalah konsep yang mencerminkan tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan di masyarakat atau organisasi. Itu mengukur sejauh mana orang menerima ketidaksetaraan tersebut.⁴⁶ Punnett dan Ricks berpendapat bahwa di negara-negara dengan tingkat *Power Distance* rendah, struktur organisasi yang lebih datar, memiliki hierarki yang lebih sedikit, jumlah pengawas yang lebih sedikit, dan gaya kepemimpinan yang demokratis akan lebih efektif. *Power Distance* sendiri adalah ukuran dari sejauh mana kewenangan diterima dalam hubungan antarindividu dan kemampuan untuk mempengaruhi, berdasarkan persepsi dalam hubungan antara atasan dan bawahan.⁴⁷ Hofstede menjelaskan *Power Distance* sebagai perbedaan tingkat antara atasan dan bawahan dalam hierarki suatu organisasi yang memengaruhi bagaimana mereka menentukan perilaku satu sama lain.⁴⁸

Indonesia memiliki tingkat *Power Distance* yang tinggi, dengan skor 78 menurut Hofstede. Dalam banyak organisasi yang berorientasi pada manfaat atau utilitarian organizations, pembagian wewenang seringkali diatur secara formal dalam struktur hierarki.⁴⁹ Piramida hirarki dibangun

⁴⁶ Hofstede G. (1983). The Cultural Relativity Of Organizational Practices And Theories. *Journal Of International Business Studies*, 14, 75-89.

⁴⁷ Betty Jane Punnett, David A. Ricks (1997), *International Business Blackwell Business*. Blackwell.

⁴⁸ Hofstede G. (1983). The Cultural Relativity Of Organizational Practices And Theories. *Journal Of International Business Studies*, 14, 75-89.

⁴⁹ Latif, N. (2009). Hubungan Nilai Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Bank Syariah.

berdasarkan hubungan antara atasan dan bawahan. Bagaimana atasan dan bawahan menjalani hubungan hierarki mereka bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor objektif, seperti keahlian yang dimiliki oleh keduanya, sejarah hubungan mereka, tugas yang mereka tangani, dan kepentingan yang terkait dengan situasi tersebut.

2.6.1 Indikator *Power Distance*

Indikator yang mempengaruhi *Power Distance*⁵⁰:

1. Tingkat keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan
2. Tingkat penggunaan otoritas atasan
3. Keterbukaan terhadap saran dan pendapat
4. Sikap bawahan terhadap keputusan atasan
5. Tingkat pendelegasian pekerjaan-pekerjaan yang penting.

2.7 *Whistleblowing*

Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan bagian penting dari pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Sistem ini digunakan untuk memberikan sarana kepada individu, yang disebut *whistleblowing*, untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. *Whistleblowing* dapat berupa karyawan perusahaan itu sendiri atau individu di luar perusahaan yang mengetahui praktik kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintahan. Pelaporan ini dapat dilakukan baik secara internal kepada pihak berwenang dalam perusahaan maupun secara eksternal kepada pihak yang berwenang di luar perusahaan, seperti lembaga pengawas atau penegak hukum. Fenomena *whistleblowing* muncul ketika seorang karyawan atau individu yang memiliki pengetahuan tentang tindakan kesalahan atau pelanggaran di tempat kerja memutuskan untuk melaporkan hal tersebut demi kepentingan publik atau kepentingan yang lebih besar. Melalui pengungkapan atau pelaporan ini, *whistleblowing* bertujuan untuk mengungkapkan tindakan yang tidak etis atau ilegal yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Tindakan *whistleblowing* ini bisa melibatkan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang di dalam perusahaan atau kepada pihak eksternal, seperti otoritas pengawasan atau penegak hukum, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghasilkan perubahan atau tindakan yang memperbaiki situasi yang salah tersebut.⁵¹

Seorang *whistleblowing* seringkali dianggap sebagai individu yang pertama kali

Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 18(2).

⁵⁰ Aliyaningsih, D. (2020). *Peran Kepemimpinan, Power Distance Dan Team Work Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Madiun Umbul Square* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

⁵¹ Susmanschi, Georgiana. 2012. Internal Audit And Whistle-Blowing. *Economics, Management, And Financial Markets*. 7(4): 415–421.

mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dianggap ilegal atau tidak etis di tempat kerjanya kepada otoritas internal dalam organisasi atau kepada badan pengawas publik. Meskipun pengungkapan tersebut tidak selalu didasari oleh niat baik dari pelapor, karena beberapa *whistleblowing* mungkin memiliki motivasi pribadi atau kepentingan tertentu, tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan kejahatan atau pelanggaran yang telah mereka ketahui atau curigai.⁵²

Menjadi seorang *whistleblowing* merupakan tindakan yang tidak sederhana, dan sebelum seseorang memutuskan untuk mengungkap atau melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, mereka perlu secara cermat mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dan strategis agar keputusan seorang *whistleblowing* untuk mengungkap pelanggaran tidak memiliki dampak negatif pada masa depan mereka, karier mereka, atau kehidupan keluarga mereka.⁵³

Whistleblowing dapat dibedakan berdasarkan dua kriteria utama. Pertama, *whistleblowing* yang mengungkapkan laporan mereka kepada pihak berwenang atau media massa dengan harapan bahwa dugaan pelanggaran atau kejahatan dapat diungkap dan diinvestigasi lebih lanjut. Kedua, *whistleblowing* yang merupakan "orang dalam," yaitu individu yang mengungkapkan dugaan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di tempat mereka bekerja atau berada. Dalam konteks *whistleblowing*, penting untuk dicatat bahwa laporan yang diberikan oleh *whistleblowing* harus benar-benar memiliki dasar dan bukti yang kuat terkait dengan dugaan pelanggaran atau kejahatan yang dilaporkan. Hal ini karena laporan *whistleblowing* seringkali memiliki dampak serius terhadap individu atau organisasi yang dituduh melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan proses penegakan peraturan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa upaya *whistleblowing* dalam mengungkap pelanggaran benar-benar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang sesuai. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pencegahan pelanggaran lebih lanjut dan memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan.⁵⁴

Dalam pengelolaan perusahaan, peran *whistleblowing* sangat signifikan dalam memberikan laporan mengenai dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan keamanan lingkungan kerja. Hal ini berlaku jika laporan yang disampaikan oleh *whistleblowing* didasarkan pada fakta dan memiliki dasar yang kuat.⁵⁵ Dalam sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), seorang *whistleblowing* harus menjaga kerahasiaan informasi

⁵² Semendawai, Abdul Haris, Et.Al, 2011, Memahami Whistle Blower , Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁵³ Zulfikri, A. (2022). Whistleblowing System Dalam Akuntansi: Tinjauan Studi Tentang Penentu Whistleblowing Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 1(01), 49-56.

⁵⁴ Wijayanto, Ridwan Zachrie. (2010). "Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab,. Akibat, Dan Prospek Pemberantasan". Jakarta: Gramedia. Yuhertiana, I. (2003).

⁵⁵ Susmanchi, Georgiana. 2012. Internal Audit And Whistle-Blowing. *Economics, Management, And Financial Markets*. Vol. 7(4): 415-421.

yang telah dilaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa *whistleblowing* dapat menerima perlindungan yang sesuai dan agar laporan yang telah disampaikan dapat diselidiki lebih lanjut. Dengan memasuki sistem perlindungan saksi, *whistleblowing* memiliki hak-hak yang seharusnya diakui dan dilindungi.

Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan KNKG (2008), *whistleblowing system* terdiri dari 3 aspek, yaitu:

1) Aspek Struktural

Aspek struktural dalam *whistleblowing system* melibatkan empat elemen infrastruktur penting, yaitu:

a. Pernyataan Komitmen

Untuk memastikan efektivitas *whistleblowing system*, penting untuk mendapatkan pernyataan komitmen dari seluruh karyawan yang menyatakan kesediaan mereka untuk menggunakan sistem ini dan berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran. Pernyataan komitmen ini dapat dibuat secara terpisah atau dimasukkan ke dalam bagian perjanjian kerja bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman etika perusahaan.

b. Kebijakan Perlindungan

Membuat kebijakan perlindungan pelapor (*whistleblowing protection policy*) adalah langkah penting bagi perusahaan. Kebijakan ini harus secara tegas dan jelas menyatakan komitmen perusahaan dalam melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik. Perusahaan juga harus menaati semua peraturan dan praktik terbaik yang berlaku dalam mengelola *whistleblowing system*. Selain itu, kebijakan ini harus menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pelapor bertujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran, menjaga keamanan pelapor dan keluarganya, serta memastikan bahwa pelapor tidak akan mengalami represalias.

c. Struktur Pengelolaan *Whistleblowing System*

Penting bagi perusahaan untuk mendirikan sebuah unit pengelola *whistleblowing system* yang memiliki tanggung jawab langsung kepada direksi dan komite audit. Unit ini harus beroperasi secara independen dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dan memiliki akses langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan. Unit pengelola *whistleblowing system* ini terdiri dari dua sub-unit utama, yaitu sub-unit perlindungan pelapor dan sub-unit investigatif. Penunjukan petugas pelaksana dalam unit ini harus dilakukan dengan memperhatikan profesionalisme dan independensi mereka, sehingga hasil yang diperoleh dapat dianggap objektif dan bebas dari konflik kepentingan pribadi.

d. Sumber Daya

Dalam melaksanakan whistleblowing system, diperlukan sumber daya yang mencakup jumlah dan kualitas personel yang cukup untuk menjalankan peran sebagai petugas pengelola whistleblowing system, serta fasilitas komunikasi yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.

2) Aspek Operasional

Aspek operasional dalam whistleblowing system mencakup mekanisme dan prosedur kerjanya. Untuk memudahkan karyawan dalam menyampaikan laporan pelanggaran, perusahaan harus menyediakan saluran khusus seperti alamat email dengan tingkat keamanan yang tinggi, kotak pos khusus yang hanya diakses oleh petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau saluran telepon khusus yang akan ditangani oleh petugas yang berwenang. Sosialisasi sangat perlu dilakukan yang meluas kepada seluruh karyawan mengenai adanya sistem pelaporan pelanggaran dan prosedur penggunaannya. Bagian alur penanganan pelaporan pelanggaran juga harus dijelaskan secara terperinci dan ditampilkan dengan jelas di tempat-tempat yang mudah diakses oleh karyawan. Dalam prosedur penyampaian laporan pelanggaran, juga harus disertakan langkah-langkah yang harus diambil jika pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, yaitu dengan mengirimkan laporan pelanggaran langsung kepada direktur utama perusahaan.

Kerahasiaan dan kebijakan perlindungan pelapor memegang peranan penting dalam whistleblowing system. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan kepada mereka yang melaporkan pelanggaran dengan itikad baik. Selain itu, perusahaan harus membangun budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan yang mereka temui. Memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada pelapor yang beritikad baik adalah salah satu cara untuk mendorong pelaporan yang jujur. Para pelapor juga berhak mendapatkan informasi mengenai penanganan kasus yang mereka laporkan, termasuk perkembangannya apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Ini akan memberikan kepercayaan kepada pelapor bahwa laporan mereka diperhatikan dan ditangani dengan serius oleh perusahaan. Petugas yang bertanggung jawab dalam unit whistleblowing system harus segera melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan kasus yang dilaporkan. Tindakan ini bertujuan untuk menilai apakah laporan mengenai kecurangan tersebut dapat dianggap serius dan perlu ditindaklanjuti, ataukah tidak.

3) Aspek Perawatan

Aspek perawatan adalah bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efektivitas whistleblowing system. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan, termasuk petugas yang bekerja di unit whistleblowing system. Selain itu, perusahaan harus secara berkala berkomunikasi dengan karyawan untuk memberikan informasi tentang hasil dari penerapan whistleblowing system. Memberikan insentif atau penghargaan kepada para pelapor pelanggaran juga dapat menjadi dorongan bagi karyawan lain yang menyaksikan pelanggaran untuk melaporkannya.

Pemantauan berkala terhadap efektivitas whistleblowing system sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Tanggung jawab pemantauan bisa diemban oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Satuan Pengawasan Internal. Dengan pemantauan yang rutin, perusahaan dapat memastikan bahwa whistleblowing system tetap berfungsi dengan baik dan efisien.

2.7.1 Indikator Keputusan Melakukan Whistleblowing

Berikut merupakan indikator keputusan melakukan *whistleblowing*, yaitu:⁵⁶

1. Orientasi Etika Relativisme

Orientasi etika merupakan fokus utama perilaku profesional yang berhubungan erat dengan moral dan prinsip-prinsip nilai yang menggerakkan perilaku. Dua karakteristik penting dalam orientasi etika ini adalah idealisme dan relativisme. Idealisme menunjukkan tekad individu untuk mengikuti nilai-nilai moral yang dianggap sebagai standar tinggi, sementara relativisme mencerminkan sikap yang lebih terbuka terhadap keragaman nilai-nilai moral, di mana individu cenderung mempertimbangkan berbagai nilai yang ada dalam diri mereka dan lingkungan sekitar dalam mengarahkan perilaku mereka.

2. Intensitas Moral

Secara bahasa, "intensitas" dapat merujuk pada tingkat atau derajat intensitas,

⁵⁶ Husniati, S., Hardi, H., & Wiguna, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing Internal (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral Dissertation, Riau University).

sedangkan "moral" mengacu pada nilai-nilai dan norma yang digunakan manusia untuk menilai tindakan orang lain yang memiliki nilai positif atau negatif. Dalam konteks ini, "intensitas moral" adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai karakteristik yang melibatkan isu-isu moral yang relevan dalam suatu situasi. Konsep ini akan memengaruhi bagaimana individu mempersepsikan masalah etika dan niat perilaku mereka dalam konteks situasi tersebut.

3. Komitmen Organisasi

Komitmen pada organisasi adalah tingkat dedikasi dan loyalitas seorang karyawan terhadap organisasi tempatnya bekerja. Ini mencakup pemeliharaan tujuan organisasi, nilai-nilai, motivasi, serta keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut dan bersedia untuk berkontribusi serta bertahan dalam lingkungan kerja tersebut. Komitmen organisasional juga mencerminkan sejauh mana seorang individu merasa terikat secara emosional dan profesional kepada organisasi tempatnya bekerja.

4. Identitas Profesional

Identitas profesional adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana seseorang mengidentifikasi dirinya dalam konteks pekerjaan atau profesi tertentu dan merasa memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari individu lain dalam lingkup yang sama. Identitas profesional seringkali mencerminkan sejauh mana seseorang merasa terhubung dengan profesi yang mereka geluti dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas atau kelompok profesi tersebut. Ini melibatkan pemahaman individu tentang peran, tanggung jawab, nilai, dan norma yang terkait dengan pekerjaan atau profesi mereka.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	WN Rahayu (2018)	Pengaruh Sikap, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> Eksternal-Internal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel	Sikap (X1), Persepsi Kontrol Perilaku (X2), Religiusitas (X3), Niat <i>Whistleblowing</i> Eksternal-Internal (Y1), Persepsi Dukungan Organisasi (Y2)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan

		Pemoderasi		whistleblowing baik secara eksternal maupun internal. Dalam hal ini, dukungan yang dirasakan dari organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara sikap dan persepsi kontrol perilaku dengan niat whistleblowing baik secara eksternal maupun internal. Namun, dukungan organisasi yang dirasakan dapat memoderasi hubungan antara religiusitas dengan niat whistleblowing.
2.	Selvi APri Putri (2022)	Kontrol Perilaku, Komitmen Profesional, Religiusitas dan Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	Kontrol Perilaku(X1), Komitmen Profesional (X2), Religiusitas (X3) Variabel Dependen (Y): Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrol perilaku dan komitmen profesional tidak memiliki pengaruh terhadap niat seorang akuntan untuk melakukan tindakan whistleblowing. Sementara itu, religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat seorang akuntan untuk melakukan tindakan whistleblowing
3.	Ilham Maulana	Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku	Sikap (X1), Persepsi Kontrol Perilaku (X2),	Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa sikap

	Saud (2016)	Terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> Internal- Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi	Religiusitas (X3), Niat <i>Whistleblowing</i> Eksternal-Internal (Y1), Persepsi Dukungan Organisasi (Y2)	memiliki dampak yang signifikan terhadap niat untuk melaporkan pelanggaran secara internal, dan persepsi dukungan organisasi memainkan peran penting sebagai variabel yang memperkuat pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat <i>whistleblowing</i> , baik secara internal maupun eksternal.
4.	Cynthia Ayu Wardani, Sulhani (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan <i>Whistleblowing</i> System Di Indonesia	Total Aset (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Inventory (X3), Anonymous Reporting (X4), Penerapan <i>Whistleblowing</i> (Y1)	Hasil penelitian ini Menurut temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaporan anonim memiliki dampak yang signifikan pada implementasi <i>whistleblowing</i> system. Penemuan ini sejalan dengan pandangan Lee dan Fergher (2012), yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memungkinkan pelaporan anonim cenderung mendukung penggunaan <i>whistleblowing</i> system. Namun, faktor lain seperti total aset,

				inventaris, dan keberadaan direktur eksternal dalam komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada implementasi whistleblowing system. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan perlu memastikan keamanan dan kerahasiaan pelapor dalam whistleblowing system.
Kadek Shintya Rahayu Dewi Damayanthi . (2017)	Pengaruh Norma Subyektif, Sikap Pada Perilaku, Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Melakukan Pengungkapan Kecurangan (<i>Whistleblowing</i>) (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Program S1 Dan Program D3 Universitas Pendidikan Ganesha)	Norma Subyektif (X1), Sikap (X2), Persepsi Kontrol Perilaku (X3), Niat <i>Whistleblowing</i> (Y1)	Hasil penelitian menunjukkan secara individual bahwa variabel norma subyektif, sikap terhadap perilaku, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan whistleblowing, dengan masing-masing nilai t hitung sebesar 2,806 (signifikansi 0,006), 2,217 (signifikansi 0,030), dan 5,365 (signifikansi 0,000). Secara bersama-sama, ketiga variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan juga	

				mempengaruhi variabel terikat, dengan hasil nilai t hitung sebesar 37,988 (signifikansi 0,000).
5.	Ayem, S. (2021)	Pengaruh Penalaran Moral, Retalasi, Religiusitas, Dan Gender Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan <i>Whistleblowing</i>	Penalaran Moral (X1), Retaliasi (X2), Religiusitas (X3), Niat Mahasiswa Melakukan <i>Whistleblowing</i> (Y1)	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penalaran moral dan tingkat religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melaporkan pelanggaran dalam konteks kecurangan akademis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melaporkan pelanggaran tersebut.
6.	Dewi, K. Y. D., & Dewi, P. E. D. M. (2018)	Pengaruh bystander effect, <i>whistleblowing</i> , asimetri informasi dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan pada badan usaha milik desa (BUMDES) di kecamatan Busungbiu.	bystander effect (X1), <i>whistleblowing</i> (X2), asimetri informasi (X3) dan religiusitas (X4). Kecendrungan kecurangan (Y1)	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, ditemukan bahwa efek bystander memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Kedua, <i>whistleblowing</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Ketiga, asimetri informasi

				memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Terakhir, religiusitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Temuan ini menggambarkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kecurangan dalam konteks penelitian ini..
7.	Pulungan, A. H. (2018)	Pengaruh Religiusitas Dan Insentif Keuangan Terhadap Intensi Melakukan <i>Whistleblowing</i> Pada Faith-Based Organization	Religiusitas (X1), Insentif Keuangan (X2), Intensi melakukan <i>whistleblowing</i> (Y1)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap intensi melakukan <i>whistleblowing</i> .
8.	Hartono, B, J. (2021)	Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen Organisasi, Dan Religiusitas Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i> .	Tingkat Keseriusan Kecurangan (X1), Personal Cost (X2), Komitmen Organisasi (X3), Dan Religiusitas (X4) Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i> . (Y1)	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Tingkat keseriusan kecurangan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i> ; (2) Personal cost tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i> ; (3) Komitmen organisasi

				tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing; (4) Religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing.
9.	Margaretha, Oktaviana Grace (2022)	Pengaruh Pelaporan Anonim dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi	Pengaruh Pelaporan Anonim (X1) dan Persepsi Kontrol Perilaku (X2) terhadap Niat <i>Whistleblowing</i> (Y1) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Y2)	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan anonim dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap niat whistleblowing. Selain itu, religiusitas memperkuat pengaruh pelaporan anonim terhadap niat whistleblowing, namun sebaliknya, religiusitas memperlemah pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing.
10.	Ayu, Lili Gomulia Sri And Wahyudi, Tertiaro. (2023)	The Influence Of Ethics Orientation, Perceived Personal Cost, And Professional Commitment On Internal <i>Whistleblowing</i> Intention (Empirical Study On Accounting Student At Economic Faculty Of	Ethics Orientation (X1), Perceived Personal Cost (X2), And Professional Commitment (X3) On Internal <i>Whistleblowing</i> Intention (Y1) (Empirical Study On Accounting Student At Economic Faculty Of	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orientasi etika idealisme dan komitmen profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan whistleblowing internal.

		Sriwijaya University)	Sriwijaya University) (2023)	Sementara itu, orientasi etika relativisme dan persepsi mengenai biaya pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan whistleblowing internal.
--	--	-----------------------	---------------------------------	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

2.9 Hipotesis

Menurut Park dan Blenkinsopp, sikap terhadap whistleblowing mencakup sejauh mana individu memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap tindakan *whistleblowing*. Ini dapat diukur melalui jumlah keyakinan yang dimiliki karyawan tentang konsekuensi dari *whistleblowing* dan evaluasi subjektif mereka terhadap konsekuensi tersebut. Dengan kata lain, sikap terhadap whistleblowing mencerminkan bagaimana seseorang menilai manfaat dan risiko yang terkait dengan mengungkapkan pelanggaran atau kecurangan.⁵⁷ Artinya, seorang *whistleblowing* perlu meyakini bahwa jika mereka memutuskan untuk melakukan whistleblowing, itu akan memiliki hasil yang menguntungkan, seperti mencegah terjadinya penipuan di perusahaan, memberikan efek peringatan kepada pelaku pelanggaran, dan manfaat-manfaat lainnya. Keyakinan akan dampak positif ini menjadi faktor pendorong utama yang mendorong niat atau keinginan seorang *whistleblowing* untuk melaporkan kecurangan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang telah dilakukan oleh Ari Andika Perdana, yang menunjukkan bahwa persepsi kontrol atas perilaku secara langsung memengaruhi perilaku whistleblowing.⁵⁸ Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Dan Insentif Finansial Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing" oleh Annisa Titania Lingga, ditemukan bahwa tingkat sikap atau perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing. Temuan ini juga mendapatkan dukungan dari penelitian lain. Sebagai contoh, penelitian oleh Perdana et al. menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan pengungkapan

⁵⁷ Park, H. And Blenkinsopp, J. 2009. Whistle-Blowing As Planned Behavior – A Survey Of South Korean Police Officers. *Journal Of Business Ethics*, Vol. 85, Pp. 545-556.

⁵⁸ Perdana, A. A., Hasan, A., & Rasuli, M. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Etika Terhadap *Whistleblowing* Intention Dan Perilaku *Whistleblowing* (Studi Empiris Di Bpkp Perwakilan Riau Dan Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 89-98.

kecurangan (*whistleblowing*). Selain itu, penelitian oleh Saud menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat *whistleblowing* internal, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *whistleblowing* eksternal⁵⁹. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang didapat sebagai berikut:

H₁: Persepsi kontrol berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*.

Pendapat yang disampaikan oleh Keller adalah bahwa religiusitas berperan sebagai dasar pembentukan standar etika atau sebagai cerminan untuk menilai perilaku etis seseorang. Hal ini karena tingkat religiusitas seseorang mencerminkan sejauh mana individu tersebut mempercayai Tuhan atau Allah, dan mayoritas agama mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan serta menjauhi perbuatan tercela. Dengan kata lain, tingkat religiusitas dapat menjadi pedoman moral yang memengaruhi perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁶⁰ Menurut Alleyne et al., tingkat religiusitas memengaruhi niat seseorang dalam membuat keputusan etis. Ketika seseorang memiliki komitmen religiusitas yang kuat, mereka cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk bertindak secara jujur, termasuk dalam konteks *whistleblowing*. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Barnett et al., yang menyimpulkan bahwa religiusitas individu berdampak pada keputusan mereka untuk melaporkan tindakan yang salah (*wrongdoing*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat religious commitment atau religiusitas dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruhnya terhadap kemungkinan munculnya niat untuk melakukan *whistleblowing*. Temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas individu yang memiliki afiliasi keagamaan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* dalam konteks lembaga yang tidak memiliki keterkaitan keagamaan. Dalam situasi tersebut, afiliasi keagamaan lembaga atau entitas tersebut tidak memengaruhi secara signifikan keinginan seseorang untuk melaporkan insiden kecurangan yang terjadi.⁶¹

Namun, pandangan yang berbeda muncul dari pandangan Dananjaya dan Rizal, yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat seseorang untuk melaporkan tindakan *whistleblowing* di lingkungan kerja. Mereka berpendapat bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin tidak selalu mampu

⁵⁹ Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 209-219.

⁶⁰ Rahayu, W. N. (2018). *Pengaruh Sikap, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Niat Whistleblowing Eksternal-Internal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi* (BachelorSs Thesis, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).

⁶¹ Putri, C. M. (2016). Pengaruh Jalur Pelaporan Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Niat Seseorang Melakukan *Whistleblowing*. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(1), 42-52.

mengaplikasikan nilai-nilai moral yang mereka anut, dan ini tidak selalu mengubah moral yang sudah mereka miliki sebelumnya.⁶² Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*.

Dalam Penelitian Hesti Eka Pratiwi, ia mengungkapkan bahwa *Power Distance* berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*⁶³, yang mana hal ini diperkuat oleh penelitian lain milik Conella yang mana mengatakan bahwa *Power Distance* berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*, penelitiannya dilakukan kepada 152 mahasiswa akuntansi⁶⁴. Terdapat lebih dari 30 penelitian yang mengatakan bahwa *Power Distance* berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing* salah satunya adalah penelitian milik Lestari dan Dwita yang berjudul Pengaruh Respon Organisasi Dan *Power Distance* Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*. Berdasarkan hipotesis tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Power Distance berpengaruh positif terhadap keputusan *whistleblowing*.

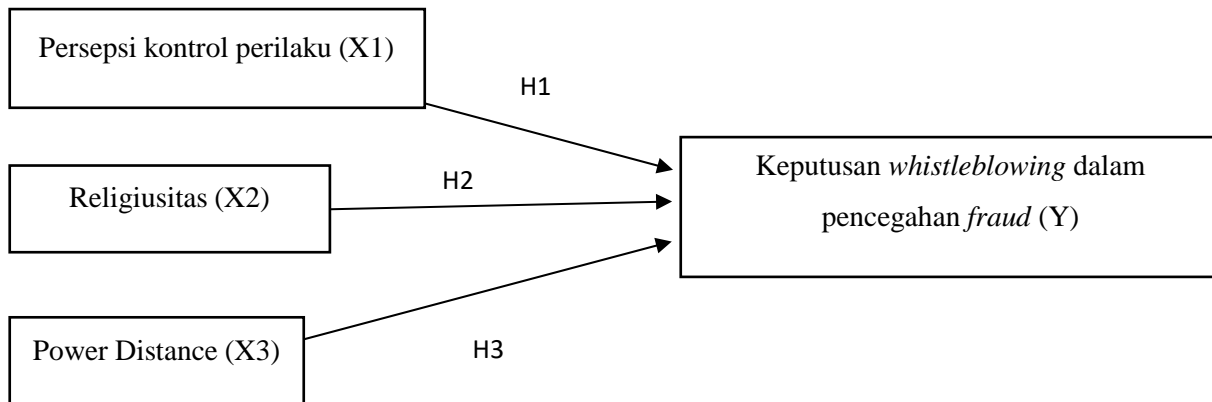
⁶² Yudha, D. D. G., & Rizal, M. (2018). Gender, Religiosity, Positive Mood And Whistleblowing Intention. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 73(1), 117-123.

⁶³ Pratiwi, H. E., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Sifat Machiavellian Dan Power Distance Terhadap Keputusan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2185-2199.

⁶⁴ Conella, M., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Retaliasi Dan Power Distance Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3642-3655.

2.10 Kerangka Penelitian

Gambar 3. Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti, mengidentifikasi hubungan antar variabel yang ada, serta melakukan uji untuk menguji validitas teori yang dapat diuji secara empiris dan memiliki nilai prediktif.⁶⁵ Penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana variabel independen (X) memengaruhi variabel dependen (Y). Pengujian variabel bebas yaitu Persepsi Kontrol Perilaku (X_1), Religiusitas (X_2), dan *Power Distance* (X_3) terhadap variabel terikat keputusan melakukan *whistleblowing* (Y).

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber informasi utama. Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau sumber tanpa melalui perantara. Kelebihan utama data primer adalah akurasi dan validitas yang lebih tinggi karena informasi diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok, bahkan melalui pengamatan langsung⁶⁶. Dalam penelitian ini, kuesioner disebar kepada responden menggunakan alat bantu Google Form (G-Form). Responden dipilih dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan mereka secara sukarela mengisi kuesioner tanpa adanya unsur paksaan. Kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan dengan format yang terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan survei, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap kondisi penelitian.⁶⁷

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada sekelompok objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus studi penelitian, dan dari populasi ini, peneliti biasanya mengambil sampel untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan yang lebih luas.⁶⁸

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶⁶ Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

⁶⁷ Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), H. 99

Penentuan populasi merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini, populasi penelitian diketahui jumlahnya yakni 125 orang staff inspektorat provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan populasi finit. Maka untuk mengetahui jumlah sampel sebuah penelitian dengan populasi finit, peneliti memutuskan menggunakan rumus slovin untuk mengukur jumlah sampel penelitian dengan rumus di bawah ini⁷⁰:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran

N : Ukuran populasi

e : presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (peneliti menggunakan error 5%).

Dalam menentukan populasi (N) maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rata-rata. Berdasarkan rumus slovin, error level yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 5%, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

$$n = \frac{125}{1 + (125 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{125}{1,3125} = 95,2$$

Sehingga dari hasil penjumlahan di atas maka peneliti membutuhkan 95 responden yang merupakan staff inspektorat provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah representasi sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi. Ketika populasi sangat besar dan peneliti memiliki keterbatasan seperti dana, waktu, atau sumber daya manusia, peneliti memilih untuk mengambil sampel yang mewakili populasi tersebut⁷¹.

Pada penelitian ini, sebagian dari populasi dipilih sebagai sumber data yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Pt. Rineka Cipta, Cet. Xiv, Jakarta, 2010), H. 173

⁷⁰ Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

⁷¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,Cv.

sampel tersebut benar-benar mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan jenis simple random sampling, yang berarti sampel diambil secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel.⁷²

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode merujuk pada suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang suatu hal dengan menggunakan langkah-langkah sistematis atau pendekatan tertentu.⁷³ Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk bidang studi, lokasi pelaksanaan, tujuan penelitian, periode waktu, jenis data yang dikumpulkan, metode yang digunakan, pendekatan logis, dan pandangan filosofis yang mendasarinya. Jenis-jenis penelitian meliputi penelitian historis yang fokus pada rekam jejak masa lalu, penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang suatu fenomena, penelitian perkembangan yang memantau perubahan seiring waktu, penelitian kasus yang mendalami situasi khusus, penelitian lapangan yang mengumpulkan data dari lingkungan alami, penelitian korelasi yang mengeksplorasi hubungan antara variabel, penelitian kausal komparatif yang mencari penyebab efek, penelitian eksperimental yang melibatkan manipulasi variabel, penelitian eksperimen semu yang mengatur variabel yang tidak dapat diubah, dan penelitian tindakan yang mengimplementasikan perubahan berdasarkan temuan penelitian untuk perbaikan konteks tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner menggunakan alat berupa formulir online (Google Forms) untuk mengumpulkan data dari responden yang menjadi subjek penelitian. Kuesioner adalah alat yang digunakan untuk menggali informasi berupa tanggapan atau jawaban dari responden terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Melalui kuesioner, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan untuk menganalisis pengaruh dari setiap variabel yang diteliti, dengan memanfaatkan tanggapan yang diberikan oleh responden.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik data, seperti nilai rata-rata (mean),

⁷² Sugiyono. (2014.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.

⁷³ Usman Dan Akbar Purnomo Setiady. 2008. *Pengantar Statistika*.

nilai minimum, nilai maksimum, serta sebaran data dalam bentuk standar deviasi. Dengan melakukan analisis ini, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam tentang data yang dimiliki dan mengekstrak informasi penting dari data tersebut. Analisis deskriptif sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses analisis data sebelum melakukan analisis statistik yang lebih lanjut.⁷⁴

3.4.2 Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kelengkapan, keteraturan, dan kemudahan pengolahan data yang diperoleh. Tujuan utama dari pengujian instrumen penelitian adalah untuk mengungkap pemahaman lebih mendalam tentang data yang diperoleh dengan menganalisis respon dan perilaku subjek yang menjadi fokus penelitian. Uji instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti, antara lain:⁷⁵

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner memiliki validitas atau tidak. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r*-hitung dengan nilai *r*-tabel ($df = n-2$). Jika nilai *r*-hitung lebih besar dari nilai *r*-tabel, maka pertanyaan tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai *r*-hitung lebih kecil dari nilai *r*-tabel, maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jika item instrumen tidak valid, maka peneliti harus menggugurkan item instrumen penelitian tersebut dan jika valid maka item instrumen penelitian dikatakan layak sehingga dapat digunakan sebagai alat yang dibagikan kepada responden penelitian. Peneliti menggunakan 30 responden untuk menguji kelayakan instrumen sesuai dengan ketentuan Singarimbun dan Effendi sehingga *rtabel* merupakan 0,3610 dan data diuji dengan rumus *pearson product moment* menggunakan bantuan SPSS 25.0.⁷⁶

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner atau instrumen pengukuran variabel dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Jika nilai Cronbach Alpha suatu variabel melebihi 0,6, maka dapat dianggap reliabel. Sebaliknya, jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6, maka instrumen

⁷⁴ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁷⁵ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁷⁶ Ghozali, Imam (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss* (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

tersebut dianggap kurang baik dalam mengukur variabel yang bersangkutan.⁷⁷

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk menilai apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Pentingnya menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak adalah karena hal ini dapat memengaruhi hasil analisis. Jika nilai signifikansi dari uji normalitas lebih besar dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi normal. Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.⁷⁸

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Hasil pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat indikasi adanya multikolinieritas, yang terjadi ketika variabel independen dalam model memiliki hubungan korelasi satu sama lain. Tanda-tanda adanya multikolinieritas dapat terlihat dari nilai tolerance dan faktor inflasi varian (VIF). Tolerance digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel tertentu dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance rendah, maka nilai VIF akan tinggi, dan ini menunjukkan adanya multikolinieritas karena variabel independen saling berkorelasi.⁷⁹

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat ketidakseragaman dalam variance dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi ketika perbedaan dalam varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam model regresi, hasil yang lebih baik diperoleh jika tidak ada heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot grafik antara prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residual (SRESID).

Dasar analisis yang dijadikan dalam uji heteroskedastisitas terdiri dari⁸⁰ :

- a. Terjadinya heteroskedastisitas dapat diindikasikan dengan adanya pola tertentu seperti titik – titik yang membentuk pola dengan teratur (bergelombang, melebar kemudian

⁷⁷ Imam Ghozali Haji. (2009.). Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program Spss / H. Imam Ghozali. Semarang :: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.,.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, N.D.).

⁷⁹ Ghozali, Imam (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁸⁰ Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

- menyempit).
- b. Tidak terjadinya heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas berupa titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Dalam analisis ini, lebih dari satu variabel independen digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen. Persamaan regresi yang dihasilkan dari analisis ini adalah hasil dari upaya untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ini, dan persamaan tersebut dirumuskan berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yaitu ⁸¹:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Keputusan Melakukan *Whistleblowing*
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien regresi variabel persepsi kontrol perilaku
 β_2 = Koefisien regresi variabel religiusitas
 β_3 = Koefisien regresi variabel *Power Distance*
 X_1 = Persepsi Kontrol Perilaku
 X_2 = Religiusitas
 X_3 = *Power Distance*

3.4.5 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau prediksi sementara yang dirumuskan dalam penelitian untuk menjawab atau menguji suatu masalah penelitian. Biasanya, hipotesis disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan yang dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis bersifat sementara karena jawaban akhirnya akan didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh selama proses penelitian, yang kemudian dapat mengkonfirmasi atau menolak hipotesis tersebut. Dengan demikian, hipotesis merupakan landasan awal untuk melakukan penelitian dan menguji sejauh mana teori atau asumsi yang diajukan dapat diuji kebenarannya.⁸². Hipotesis dapat dites menggunakan dua metode, yakni membandingkannya dengan data empiris yang ada atau

⁸¹ Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. 21 Update Pls Regresi. Semarang: Badan Penerbit Uni Versitas. Diponegoro.

⁸² Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono. Bandung :: Alfabeta.,

memeriksa apakah konsisten secara logis.⁸³

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan menggunakan (uji F).

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara terpisah, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian ini bertujuan untuk menentukan tingkat signifikansi karakteristik individu (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara terpisah terhadap kinerja karyawan (Y). Dikatakan berpengaruh signifikan apabila signifikan $< \alpha$ (0,05)⁸⁴. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,05), maka hipotesis di dukung.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,05), maka hipotesis tidak di dukung.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen terdiri dari Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2), dan Power Distance, sedangkan variabel dependennya adalah Keputusan Melakukan Whistleblowing (Y). Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis awal mengenai dampak karakteristik individu (X1), lingkungan kerja (X2) terhadap perilaku whistleblowing (Y). Menurut Ghozali, tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah 0,05. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen⁸⁵.

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Besarnya nilai R berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1 nilai R tersebut maka semakin besar pula variabel bebas (X)

⁸³ Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁸⁴ Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁸⁵ Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

mampu menjelaskan variabel terikat (Y)⁸⁶.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang berbeda yaitu variabel dependen dan independen yang dilakukan pengukuran. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Indikator Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Persepsi Kontrol Perilaku (X1) (WN Rahayu, 2018)	Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, jadi semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka semakin kuat niat seseorang melakukan perilaku tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat kerja mengabaikan laporan kecurangan. 2. Pelapor menghadapi banyak kesulitan dalam proses pelaporan kecurangan. 3. Laporan adanya kecurangan tidak akan membuat perbedaan apapun di tempat kerja. <p>Pelapor akan menghadapi banyak kesulitan dalam proses pelaporan korupsi.</p>
Religiusitas (X2) (Abdul Hamid Rodiansah & Ayu Fury Puspita, 2020)	Religiusitas merupakan tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa bahwa agama penting karena memberikan jawaban atas pertanyaan tentang makna dari kehidupan 2. Menghabiskan waktu di waktu pribadi dengan kegiatan keagamaan

⁸⁶ Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

		<p>3. Meyakini agama ada di belakang kehidupan</p> <p>4. Mempunyai pengaruh dalam pergaulan sehari-hari</p> <p>5. Menghabiskan waktu untuk tumbuh dalam memahami agama</p> <p>Membaca buku atau majalah tentang agama.</p>
<p><i>Power Distance (X3)</i> (Aliyaningsih, 2019)</p>	<p><i>Whistleblowing</i> didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi atas tindakan atau kelalaian korporasi yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau tidak sah kepada pihak-pihak yang dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut</p>	<p>1. Tingkat keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan</p> <p>2. Tingkat penggunaan otoritas atasan</p> <p>3. Keterbukaan pimpinan terhadap saran dan pendapat dari bawahan</p> <p>4. Sikap bawahan terhadap keputusan pimpinan.</p> <p>Tingkat pendelegasian pekerjaan-pekerjaan yang penting</p>
<p>Keputusan Melakukan <i>Whistleblowing</i> (Husniati, S., Hardi, H., & Wiguna, M. 2020).</p>	<p>Keputusan melakukan <i>whistleblowing</i> adalah seseorang dalam melakukan tindakan whistleblowing merupakan tindakan yang mungkin dilakukan individu untuk melaporkan pelanggaran baik secara internal maupun secara eksternal.</p>	<p>1. Orientasi Etika Relativisme</p> <p>2. Intensitas Moral</p> <p>3. Komitmen Organisasi</p> <p>Identitas Profesional</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Inspektorat merupakan salah satu lembaga pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Inspektorat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sebagai sebuah instansi di bawah pemerintahan provinsi yang beroperasi di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas fungsional dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Inspektorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Mandat serta petunjuk pelaksanaan tugas Inspektorat ini diberikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan Pembentukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di provinsi tersebut. Selain itu, Inspektorat ini berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan amanat yang diberikan oleh pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tersebut. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah gambaran umum mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh lembaga ini pada akhir perencanaan. Oleh karena itu, visi ini seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan manfaat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rencana jangka menengah tahun 2019-2024. Visi ini seharusnya mencerminkan posisi strategis lembaga ini dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam berbagai kegiatan pemerintah provinsi tersebut. Dengan demikian, visi ini akan membantu membimbing perencanaan dan pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara

komprehensif dan terarah.

Berdasarkan evaluasi sejarah, tantangan yang dihadapi saat ini, serta pedoman dan arahan yang tercantum dalam rencana strategis Provinsi Jawa Tengah 2019-2024, yang berjudul "Menuju Jawa Tengah yang Makmur, Mandiri, dan Bebas dari Korupsi dan Pungli," dan juga berdasarkan tujuan Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berfokus pada "Menjadi lembaga pengawas internal pemerintah yang memiliki kapabilitas untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah," maka misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan seperti berikut :

1. Menentukan kewenangan serta kedudukan inspektorat.
2. Mengoptimalkan profesionalitas pegawai negara.
3. Meningkatkan sinergitas para pegawai pengawasan internal pemerintah.

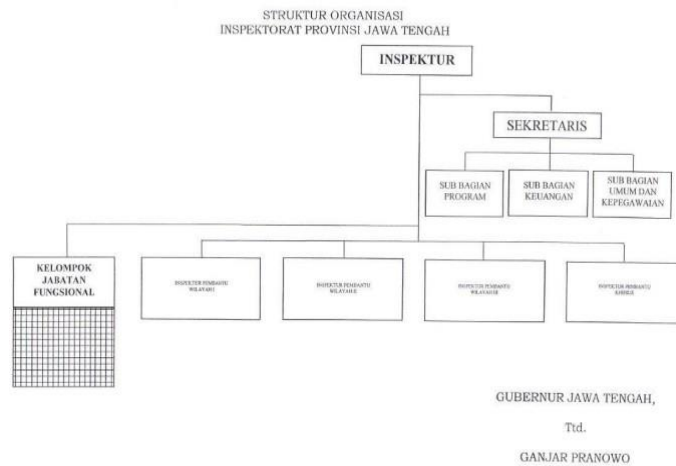
4.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pembentukan struktur organisasi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:

1. Pengawas
2. Sekertariat membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Evalap
 - c. Subbagian Adum
3. Pengawas Pembantu Wilayah I, II, III, Khusus membawahi:
 - a. Sie Bagian pembangunan
 - b. Sie Bagian pemerintahan
 - c. Sie Bagian kemasyarakatan

Ada klasifikasi berdasarkan Jabatan Fungsional, yang dapat diamati dari jumlah jabatan fungsional yang telah dikelompokkan dalam berbagai kategori sesuai dengan jenis jabatan tersebut. Di bawah ini adalah ikhtisar Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008):

Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2019-2024

Dengan perubahan dalam tata kelola dan struktur institusi Inspektorat berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, jabatan yang sebelumnya di bawah Inspektur Pembantu Wilayah telah di-inpassing menjadi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) sejak bulan September 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sedang dalam proses persiapan revisi Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi sebagai sebuah lembaga pendukung bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengawasan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah komando Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berada di bawah pengawasan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang membantu pimpinan provinsi dalam menjalankan peran pengawasan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan monitoring terhadap kegiatan pemerintah di wilayah provinsi serta membina kegiatan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Inspektorat juga menjalankan peran lain, seperti penelusuran, pengulasan, pemantauan, dan evaluasi, semua ini

dilakukan untuk menjalankan tugasnya yang sangat penting. institusi ini memiliki peran :

1. Perancangan kegiatan monitoring.
2. Perancangan ketentuan serta fasilitator bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
3. Pengamatan, penelusuran, pengkajian dan pemberian skor.
4. Evalap bidang pengawasan.
5. Menjalankan rumah tangga inspektorat.
6. Menjalankan tugas lain sesuai ketentuannya.

Berlandaskan Peraturan yang berlaku, Institusi ini juga melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Evaluasi menjelang akhir jabatan pimpinan daerah.
2. Peneluauran bertahap hingga berskala besar.
3. Pengamatan pada laporan yang diberikan bidang secara berkala.
4. Penelusuran berdasarkan fakta akan terjadinya tindakan penyimpangan.
5. Pemberian skor berdasarkan kemanfaatan serta kesuksesan peraturan saat menjalankan kegiatan.
6. Monev kegiatan pemerintah di tiap wilayah.

4.1.4 Tugas Jabatan Fungsional dan Struktural

Berlandaskan ketentuan Pergub Jateng nomor 82 tahun 2008 mengenai tugas pokok fungsi dan tata kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah perihal peran sktruktural Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yakni :

1. Pengawas: Pengawas ialah manajer pelaksana peran inspektorat.
2. Sekertaris: Berlandaskan ketentuan peran sekertaris yakni penyiapan materi kegiatan rapat dan administrasi dilingkup Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Khusus:
Berdasarkan ketentuan pengawas perbantuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran menjalankan pengawasan ketika kegiatan pemerintahan dilaksanakan serta penanganan di daerah.
4. Auditor:
 - a. Peran auditor berdasarkan ketentuan berlaku ialah menjalankan peran fungsional pengawasan dalam lingkup petugas pengawas internal.
 - b. Peran penting berdasarkan kedudukan berlandaskan ketentuan yang berlaku yakni:
 - 1) Peran inti seorang auditor berdasarkan peraturan adalah melakukan aktivitas

- perancangan, pemetaan, kegiatan rinci, pengawalan serta evaluasi pengawasan.
- 2) Pada saat melakukan tugas harus melihat efektifitas, efisiensi, pengendalian terhadap bidang yang sedang di amati.
- c. Auditor berwenang untuk:
- 1) Mendapatkan penjelasan serta arsip yang harus diserahkan pada satuan bidang yang sedang ditelusuri.
 - 2) Melaksanakan penelusuran serta mengumpulkan seluruh informasi sebagai barang bukti berhubungan dengan tugas.
 - 3) Menentukan macam arsip jenis berita dan fakta pendukung.
 - 4) Mengobservasi dengan nyata seluruh kepemilikan asset pegawai institusi terkait yang sedang di telusuri.
 - 5) Memakan sumber daya berkompeten selain auditor.
5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) :
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa jabatan Pengawas Pemerintahan memiliki kedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
 - b. Peran pokok Pengawas Pemerintahan (PPUPD) berdasarkan peraturan adalah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis urusan pemerintahan di daerah, dengan cakupan yang mencakup pengawasan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

4.1.5 Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional

1. Pengawas: Pengawas mengomandoi kegiatan peran Inspektorat, yaitu:
 - a. Perancangan kegiatan monitoring.
 - b. Perancangan peraturan serta menjadi fasilitator monitoring
 - c. Memeriksa, menelusuri, pengkajian dan pemberian skor sesuai amanat pengawasan.
 - d. Evalap bagian pengawasan.

- e. Kesekretariatan inspektorat.
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai amanat gubernur.
2. Sekretaris: Guna menjalankan inti amanat, sekretaris menjalankan peran :
- a. Mempersiapkan materi koordinasi serta pengawalan rancangan kegiatan kerja pengawasan.
 - b. Mengumpulkan, menata, memberi skor serta mempersiapkan LHP petugas pengawas daerah.
 - c. Kategorisasi materi nyata guna cara membinafungsional.
 - d. Kategorisasi inventaris serta koordinasi berlandaskan fakta dalam menghadapi penindakan laporan.
 - e. Melaksanakan bagian SDM, Finansial serta rumah tangga.
 - f. Melaksanakan amanat lain sesuai peran dan tugasnya
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Khusus: Guna menyelenggarakan amanat pengawas pembantu melaksanakan peran:
- a. Menginisiasi aktivitas pengawasan daerah.
 - b. Pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemda.
 - c. Memeriksa, mengurut, menganalisa dan pemberian skor terhadap kerja pengawas daerah.
 - d. Melaksanakan amanat lain yang ditugaskan.

4.2 Metode Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Karakteristik-karakteristik penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Tabel 5. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Curmulative Percent
Pria	30	29.4	29.4	29.4
Wanita	72	70.6	70.6	100.0

Total	102	100.0	100.0	
--------------	------------	--------------	--------------	--

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Informasi dari Tabel 4.1 mengindikasikan bahwa dalam sampel yang digunakan dari staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 72 orang. Sedangkan, jumlah responden laki-laki adalah 30 orang. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar staf di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah perempuan.

2. Posisi Kerja

Tabel 6. Karakteristik Posisi Kerja Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Curmulative Percent
Auditor	25	24.5	24.5	24.5
Staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	77	75.5	75.5	100.0
Total	102	100.0	100.0	

SSumbe

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari aparatur Inspektorat Jawa Tengah yang menjadi responden adalah staff, dengan jumlah sebanyak 77 orang. Sedangkan, jumlah auditor yang menjadi responden adalah 25 orang. Dari data ini, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar aparatur Inspektorat Jawa Tengah memiliki posisi kerja sebagai staff biasa.

3. Lama Bekerja

Tabel 7. Karakteristik Lama Bekerja Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Curmulative Percent
< 5 tahun	60	58.8	58.8	58.8
5 – 10 tahun	25	24.5	24.5	75.5

10 – 20 tahun	17	16.7	16.7	100.0
Total	102	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menjadi responden telah bekerja selama kurang dari 5 tahun, dengan jumlah sebanyak 60 orang. Sementara itu, terdapat responden yang telah bekerja selama 5-10 tahun dan 10-20 tahun. Dari data ini, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun.

4. Lama Bekerja

Tabel 8. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Curmulative Percent
S1	37	36.3	36.3	36.3
S2	40	39.2	39.2	75.5
D3	25	24.5	24.5	100.0
Total	102	100.0	100.2	

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Dari data yang terdapat dalam Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian memiliki tingkat pendidikan S2, dengan jumlah sebanyak 40 orang. Sementara itu, terdapat juga responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 dan D3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki latar belakang pendidikan S2.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik dari masing-masing variabel penelitian. Gambaran ini diperoleh melalui beberapa parameter statistik seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (maximum), dan nilai minimum (minimum). Statistik deskriptif membantu dalam merangkum dan

menginterpretasikan data penelitian, sehingga peneliti dapat memahami distribusi data dan tren umum yang ada dalam dataset.

Tabel 9. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	102	15.00	25.00	2098.00	20.5686	2.13184
Religiusitas (X2)	102	21.00	40.00	3418.00	33.5098	3.64446
Power Distance (X3)	102	20.00	40.00	3299.00	32.3431	4.43991
Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)	102	17.00	25.00	2124.00	20.8235	1.78781
Valid N (listwise)	102					

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif pada penelitian ini mempunyai jumlah sampel 102 data, dimana pada variabel yang memiliki nilai sum terbesar terletak pada variabel Religiusitas (X2) dengan nilai sebesar 3418. Variabel tersebut juga mempunyai nilai mean besar dibandingkan dengan variabel lainnya yakni sebesar 33.5098 dimana standar deviasi variabel tersebut lebih kecil dari mean yakni 3.64446 sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data luas sehingga variabel tersebut baik.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Angka yang digunakan untuk setiap instrumen adalah nilai korelasi antara variabel X dan Y, yang diukur menggunakan metode Pearson Correlation. Instrumen-instrumen tersebut dianggap valid jika nilai r-hitung (korelasi yang dihitung) lebih besar daripada nilai r-tabel yang sesuai. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.0 dan rumus Pearson Product Moment. Setiap butir instrumen memiliki nilai validitas tersendiri. Karena penelitian ini melibatkan 30 responden dan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, nilai r-tabel yang digunakan adalah 0,3610. Oleh karena itu, instrumen dianggap valid jika nilai korelasi (r-hitung) lebih besar daripada 0,3610. Hasilnya menunjukkan bahwa semua instrumen memiliki validitas yang memadai:

Tabel 10. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R_{Hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	X1.1	0,856	0.3610	Valid
	X1.2	0,768	0.3610	Valid
	X1.3	0,794	0.3610	Valid
	X1.4	0,678	0.3610	Valid
	X1.5	0,775	0.3610	Valid
Religiusitas (X2)	X2.1	0,646	0.3610	Valid
	X2.2	0,820	0.3610	Valid
	X2.3	0,839	0.3610	Valid
	X2.4	0,861	0.3610	Valid
	X2.5	0,861	0.3610	Valid
	X2.6	0,475	0.3610	Valid
	X2.7	0,839	0.3610	Valid
	X2.8	0,861	0.3610	Valid
<i>Power Distance</i> (X3)	X3.1	0,718	0.3610	Valid
	X3.2	0,842	0.3610	Valid
	X3.3	0,942	0.3610	Valid
	X3.4	0,942	0.3610	Valid
	X3.5	0,683	0.3610	Valid
	X3.6	0,568	0.3610	Valid
	X3.7	0,942	0.3610	Valid
	X3.8	0,942	0.3610	Valid
Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)	Y1	0,856	0.3610	Valid
	Y2	0,768	0.3610	Valid
	Y3	0,794	0.3610	Valid
	Y4	0,678	0.3610	Valid
	Y5	0,775	0.3610	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu kuesioner dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur variabel atau konstruk tertentu. Suatu kuesioner dianggap reliabel jika jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian, suatu variabel dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha-nya (biasanya dilambangkan dengan α) lebih besar dari 0,60. Dengan kata lain, nilai Cronbach Alpha yang tinggi menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih baik dalam mengukur variabel tersebut.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient</i>	Keterangan
Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	0,831	Reliabel
Religiusitas (X2)	0,910	Reliabel
<i>Power Distance</i> (X3)	0,925	Reliabel
Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)	0,831	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan metode Cronbach Alpha dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25.0 untuk mengukur reliabilitas instrumen yang digunakan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Cronbach Alpha, hasilnya menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel. Hal ini terjadi karena semua nilai (α) lebih besar dari 0,60, memenuhi kriteria reliabilitas yang diterima secara umum.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data dalam suatu kelompok atau variabel memiliki distribusi yang mengikuti pola normal atau tidak. Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

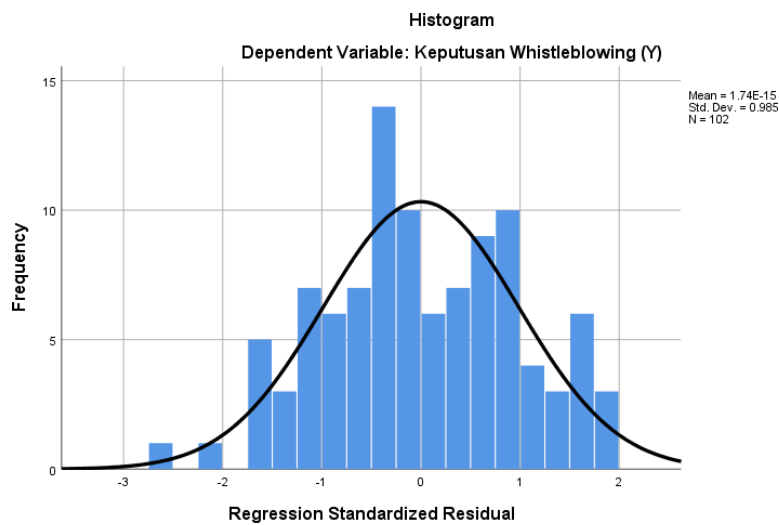
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual

N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90791316
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.046
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

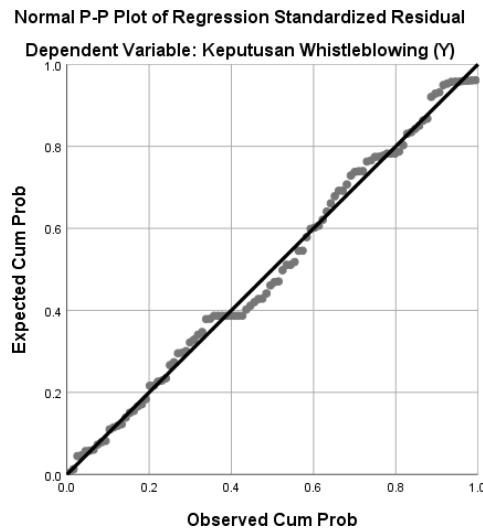
Dapat diambil kesimpulan melalui tabel *output* SPSS 4.8 bahwa data yang dihimpun peneliti memiliki distribusi dan sebaran normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $> 0,05$ yakni 0.200. Sehingga hasil residual dari variabel-variabel penelitian memiliki distribusi data yang normal.

Gambar 5. Hasil Uji Histogram



Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Gambar 6. Hasil Normal P-Plot



Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Selain itu, peneliti juga melakukan uji histogram dan normal p-plot untuk memvalidasi hasil dari normalitas Kolmogorov-smirnov yang mana peneliti juga menemukan bahwa pada output histogram data terdistribusi secara normal karena dasar keputusan yang menyatakana bahwa apabila grafik histogram menggambarkan pola distribusi yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tepat ditengah seperti bentuk lonceng maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Sedangkan pada normal p-plot, hasil residual data diatas dapat dikatakan normal karena berdasarkan pada dasar keputusan normal p-plot yang mana jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara beberapa variabel independen dalam model regresi linier berganda. Data variabel independen dikatakan baik jika tidak berkorelasi satu sama lain.

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.200	1.019		4.12	.00		

					3	0		
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	.290	.050	.346	5.774	.000	.732	1.366
	Religiusitas (X2)	.243	.033	.496	7.310	.000	.573	1.746
	Power Distance (X3)	.077	.028	.192	2.792	.006	.554	1.804
a. Dependent Variable: Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)								

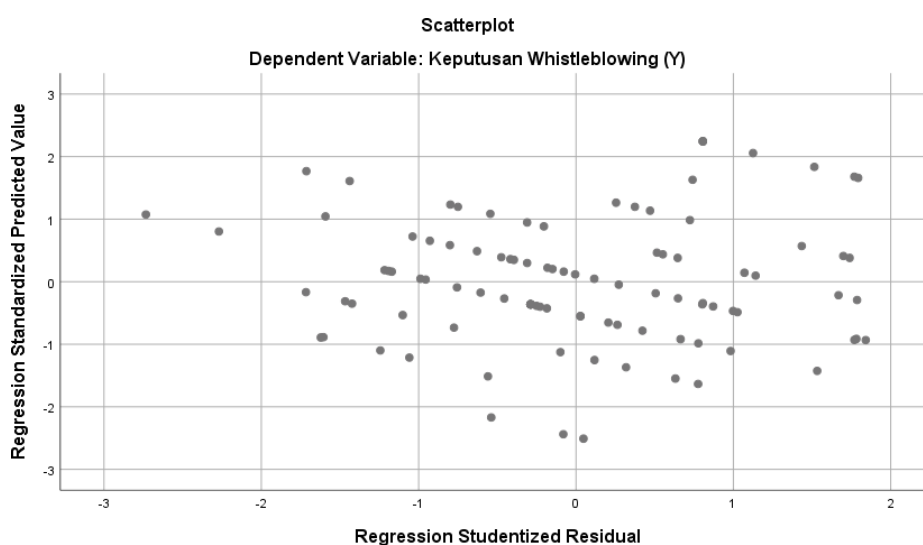
Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen penelitian ini yakni karena memiliki nilai *Tolerance* seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF seluruh variabel independen juga lebih kecil dari 10,0.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai ketidaksamaan varians dari residual yang diuji regresi kembali. Uji ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti karena variabel independen dalam penelitian lebih dari satu. Jika variabel terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi berganda dikatakan tidak valid.

Gambar 7. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dan tabel *output* uji heteroskedastisitas data penelitian melalui SPSS 25.0 teknik Scatterplot di atas, maka data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Keputusan ini diambil peneliti karena tidak ada pola tertentu yang disebabkan oleh titik-titik yang menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada keempat variabel independen. Selain itu, untuk memvalidasi hasil uji heteroskedastisitas scatterplot diatas, peneliti juga melakukan uji heteroskedastisitas glejser dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.435	.573		-.759	.450
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	-.007	.028	-.027	-.236	.814
	Religiusitas (X2)	.035	.019	.245	1.898	.061
	Power Distance (X3)	.004	.016	.031	.233	.816

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dan juga tabel 4.11, maka dapat dilihat bahwa ketiga variable independent yaitu Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas, dan *Power Distance* tidak mengalami *heteroskedastisitas*. Keputusan ini diambil peneliti karena nilai *Significance* masing-masing variabel lebih dari 0,050.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dan juga persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen yakni Keputusan *Whistleblowing* (Y).

Tabel 15. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.

		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.200	1.019		4.123	.000
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	.290	.050	.346	5.774	.000
	Religiusitas (X2)	.243	.033	.496	7.310	.000
	Power Distance (X3)	.077	.028	.192	2.792	.006
a. Dependent Variable: Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)						

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil dari tabel 15 diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 4.200 + 0.290 X1 + 0.243 X2 + 0.077 X3 + e$$

Dari persamaan regresi yang telah dipresentasikan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 4.200. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi X1, X2, X3 bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Y adalah 4.200.

Dari persamaan diatas maka dapat dijadikan acuan untuk diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Constant: 4.200 artinya apabila persepsi kontrol perilaku, religiusitas dan *Power Distance* nilainya 0 maka keputusan melakukan whistleblowing sebesar 4.200
2. Koefisien regresi persepsi kontrol perilaku sebesar 0.290 Artinya, semakin positif persepsi kontrol perilaku seseorang terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan sikap sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan 110 terhadap keputusan untuk melakukan whistleblowing sebesar 0.290.
3. Koefisien regresi religiusitas sebesar 0,243 dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan norma subjektif sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan

peningkatan keputusan untuk melakukan whistleblowing sebesar 0,243.

4. Koefisien regresi *Power Distance* perilaku sebesar 0.077 dan menunjukkan tanda positif. Artinya, semakin tinggi jarak kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan persepsi kontrol perilaku sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan keputusan untuk melakukan whistleblowing sebesar 0.077.

4.7 Uji Statistik

4.7.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T adalah sebuah uji hipotesis yang dilaksanakan peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dasar keputusan pada uji T adalah melalui nilai signifikansi dan nilai t hitung, dimana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel dikatakan berpengaruh. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 (= 5%). Untuk menentukan T tabel dapat digunakan rumus $df = n - k = (102 - 3) = 99$, dimana N = jumlah sampel dan K = jumlah variable bebas, sehingga menghasilkan T tabel sebesar 1.98350.

Tabel 16. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.200	1.019		4.123	.000
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	.290	.050	.346	5.774	.000
	Religiusitas (X2)	.243	.033	.496	7.310	.000
	Power Distance (X3)	.077	.028	.192	2.792	.006

a. Dependent Variable: Keputusan *Whistleblowing* (Y)

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil dari uji T diatas menunjukkan bahwa:

- Nilai signifikansi dari variabel Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) lebih kecil dari 0,050 sehingga Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan *Whistleblowing* (Y) secara parsial.
- Nilai t_{tabel} 102 data dengan tingkat kepercayaan 95% : 1.98350 dan diketahui nilai t hitung untuk variabel Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) merupakan lebih dari nilai t tabel sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) terhadap Keputusan *Whistleblowing* (Y) secara parsial.
- Hasil penjelasan diatas membuat hipotesis penelitian yakni H_{a1} , H_{a2} , H_{a3} diterima dan H_0 masing-masing hipotesis yang telah disebutkan ditolak.

4.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Agar peneliti mengetahui apakah adanya pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) maka peneliti melakukan uji F menggunakan bantuan SPSS versi 25.0.

Tabel 17. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	239.569	3	79.856	93.999	.000 ^b
	Residual	83.255	98	.850		
	Total	322.824	101			
a. Dependent Variable: Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)						
b. Predictors: (Constant), Power Distance (X3), Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2)						

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan pada *output* SPSS melalui tabel diatas, diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar $93.999 > F_{tabel} 2.69$. Selain itu, nilai signifikansi tabel anova diatas adalah $0,000 < 0,05$, sehingga peneliti menarik garis besar bahwa terdapat pengaruh secara simultan yang diberikan variabel Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) terhadap Keputusan

Whistleblowing (Y). Maka hal tersebut membuat hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak.

4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi adalah uji yang dilakukan peneliti untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.742	.734	.92171
a. Predictors: (Constant), Power Distance (X3), Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2)				
b. Dependent Variable: Keputusan <i>Whistleblowing</i> (Y)				

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,734 yang berarti bahwa pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2) dan *Power Distance* (X3) terhadap Keputusan *Whistleblowing* (Y) adalah sebesar 73,4%. Sedangkan 26,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan dan Analisis Data

4.8.1 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*. Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa persepsi kontrol perilaku memberikan pengaruh positif terhadap keputusan melakukan *whistleblowing* dengan koefisien 0,290. Hasil pengujian hipotesis juga menghasilkan t hitung sebesar 1.98350 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menandakan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin positif persepsi kontrol perilaku seseorang terhadap *whistleblowing*, maka semakin tinggi pula keputusan orang tersebut untuk melakukan *whistleblowing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Ajzen dalam Theory of Planned Behavior. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu, yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective

norm), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*). Persepsi kendali perilaku mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan hasil dari perilaku yang akan dilakukan. Hal ini memungkinkan individu untuk membedakan antara perilaku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Salah satu fenomena yang menyangkut persepsi kontrol perilaku dimana individu dianggap tidak bisa mengendalikan diri adalah kasus jual beli jabatan yang terjadi di Pemalang dan dilakukan oleh oknum pemerintahan Kabupaten Pemalang. Selain dugaan jual beli jabatan yang bernilai miliaran rupiah, oknum pejabat pemerintahan kabupaten tersebut juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan beras PNS/ASN. Kasus ini ditangani oleh Inspektorat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah karena adanya pengaduan masyarakat yang didapatkan oleh *Indonesia Police Watch (IPW)*.⁸⁷

Keyakinan dalam persepsi kontrol perilaku juga dibahas dalam penelitian sebelumnya, Ari Adnika Pratama (2018) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan *whistleblowing*. didukung oleh penelitian lain milik Annisa Titania Lingga (2023) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian milik Widyawati Noviandini (2018).

4.8.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing*

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variable religiusitas terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*. Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa persepsi kontrol perilaku memberikan pengaruh positif terhadap keputusan melakukan *whistleblowing* dengan koefisien 0,243. Hasil pengujian hipotesis menghasilkan t hitung sebesar 1.98350 dengan signifikansi sebesar 0,000. Artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan orang tersebut untuk melakukan *whistleblowing*.

Religiusitas menurut Rakhmat Jalaludin (2015) merupakan suatu keadaan pada suatu individu yang mendorong untuk bertindak laku dengan kadar ketaatannya pada agama. Dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan juga didasari oleh tingkat religiusitas seseorang, penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang mana didalam teori ini menyatakan bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi keputusan individu karena pada dasarnya religiusitas adalah hal yang mencangkup aqidah dan akhlak atau sikap hidup yang

⁸⁷ A. 2022, 31 1juli. Kasus Jual Beli Jabatan Di Pemalang Mulai Diusut. <https://www.puskapik.com/29342/Berita/Kasus-Jual-Beli-Jabatan-Di-Pemalang-Mulai-Diusut/> (Diakses Pada, 2023-10-12)

mencangkup kepribadian manusia dalam menjalani system kehidupannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Sri Ayem dan Rumdoni dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Penalaran Moral, Retaliiasi, Religiusitas dan Gender Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan *Whistleblowing*” yang mengatakan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*. Tetapi hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh BJ Hartono (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh dengan keputusan melakukan *whistleblowing*.

4.8.3 Pengaruh *Power Distance* Terhadap Keputusan Melakukan *Whistleblowing*

Hasil uji hipotesis variabel ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Power Distance* terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*. Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa *Power Distance* memberikan pengaruh positif terhadap keputusan melakukan *whistleblowing* dengan koefisien 0,077. Hasil pengujian hipotesis menghasilkan t hitung sebesar 1.98350 dengan signifikansi sebesar 0,006. Hal ini menandakan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jarak kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan orang tersebut untuk melakukan *whistleblowing*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok kearah pencapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa *power distance* memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan seorang individu. Salah satu fenomena yang menyatakan bahwa *power distance* berperan penting dalam melakukan keputusan adalah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tiga orang Kepala Daerah di Jawa Tengah, terdiri dari satu Wali Kota dan dua Bupati, kecurangan terjadi karena adanya *power distance* atau jarak kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa. Hal ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sesuai dengan hasil milik beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan variable yang sama yaitu Hesti Eka Pratiwi (2020) yang mengungkapkan bahwa *Power Distance* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *whistleblowing* yang kemudian juga diperkuat dengan penelitian milik Conella (2020). Tetapi hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian milik Florencia Pangestu (2022) yang menyatakan

⁸⁸ Erna Yunus B. 2022, 15 Januari . Tiga Kepala Daerah Di Jateng Dilaporkan Ke Kpk Dugaan Korupsi. <https://www.rmoljawatengah.id/tiga-kepala-daerah-di-jateng-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-korupsi>. (Diakses Pada, September, 13-2023)

bahwa *Power Distance* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*.

4.8.4 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan *Power Distance* terhadap *Whistleblowing* Secara Simultan

Berdasarkan hasil analisis statistic yang telah diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan *Power Distance* berpengaruh secara simultan terhadap *whistleblowing*. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah nilai F_{hitung} sebesar 93.999 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2.69 yang mengindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan.

Selain itu, nilai signifikansi dalam uji F sebesar 0.000, lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya ($\alpha = 0,05$), memperkuat kesimpulan ini. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya pengaruh secara kebetulan sangat rendah, dan oleh karena itu, peneliti dapat dengan keyakinan menyimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis ini, peneliti dapat mengkonfirmasi bahwa hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini diterima. Hal ini diperkuat oleh *Theory of Planned Behavior* yang mana menyatakan bahwa sikap, kepercayaan atau keyakinan seseorang dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap keputusan seseorang dalam melakukan suatu Tindakan atau keputusan.

Berdasarkan Uji R yang telah dilakukan oleh peneliti Nilai R Square sebesar 0,742 yang berarti bahwa pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y adalah sebesar 74.2%. Sedangkan sisanya 25,8% dipengaruhi oleh faktor variable lain diuar penelitian ini atau nilai error.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh serta melakukan uji statistik menggunakan SPSS 25, penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang kuat dan bermakna terkait dengan isu yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kontrol Perilaku yang dimiliki oleh seseorang khususnya seorang auditor pemerintahan atau staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sangat memengaruhi keputusannya untuk melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan melalui hasil uji parsial signifikansi yang berpengaruh positif.
2. Religiusitas yang dimiliki seseorang khususnya seorang auditor pemerintahan atau staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memengaruhi keputusannya untuk melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan melalui hasil uji parsial signifikansi yang berpengaruh positif.
3. *Power Distance* atau tingkat jabatan yang dimiliki setiap orang khususnya seorang staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memengaruhi keputusan untuk melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan melalui hasil uji parsial signifikansi yang berpengaruh positif.
4. Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel Persepsi Kontrol Perilaku (X1), Religiusitas (X2), dan *Power Distance* (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Melakukan *Whistleblowing*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti masih jauh dari kata sempurna, banyaknya kekurangan terjadi akibat keterbatasan yang dialami selama penelitian seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini memiliki ruang lingkup yang tidak luas, penelitian hanya pada satu badan pemeriksaan keuangan pemerintahan yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga hasil penelitian terbatas generalisasi.

2. Data primer yang diperoleh hanya berasal dari kuesioner.
3. Jumlah data yang dikumpulkan belum maksimal dikarenakan penyerahan data yang dilakukan pada masa sibuk staff Inspektorat Provisi Jawa Tengah.

5.3 Saran

Penulis mengakui bahwa dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang memengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Waktu Pengumpulan Data yang Tepat: Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan waktu pengumpulan data yang tidak bertepatan dengan periode sibuk auditor, seperti awal dan akhir tahun. Ini dapat membantu dalam mendapatkan partisipasi yang lebih baik dan data yang lebih lengkap.
2. Penambahan Data Kualitatif: Selain data kuantitatif dari kuesioner, peneliti dapat mempertimbangkan penambahan data kualitatif melalui wawancara dengan beberapa auditor yang menjadi responden. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan whistleblowing.
3. Perluasan Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan perluasan ruang lingkup survei, tidak hanya terbatas pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Membandingkan data dari beberapa badan pemeriksaan keuangan pemerintahan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan lebih representatif.

Semua saran di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian dan relevansinya dalam memahami fenomena whistleblowing di lingkungan instansi pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- A. 2022, 31 1juli. Kasus Jual Beli Jabatan Di Pemalang Mulai Diusut. <https://www.puskapik.com/29342/Berita/Kasus-Jual-Beli-Jabatan-Di-Pemalang-Mulai-Diusut/> (Diakses Pada, 2023-10-12)
- Ajzen, I., & Fishbein, M., (1975), "Belief, Attitude, Intention, And Behavior: An Introduction To Theory And Research", 129-385, Addison-Wesley, Reading, Ma.
- Ajzen, Icek., Brown, C. Dan Carvajal, F, 2004, "Explaining The Discrepancy Between Intentions And Actions: The Case Of Hypothetical Bias In Contingent Valuation." University Of Massachusetts. Amherst.
- Aliyaningsih, D. (2020). Peran Kepemimpinan, *Power Distance* Dan Team Work Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Madiun Umbul Square (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Aliyaningsih, D. (2020). *Peran Kepemimpinan, Power Distance Dan Team Work Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Madiun Umbul Square* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Andayani, Dwi. (2018). Pengaruh Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bpr Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Islam. *Inovatif*. 4 (1): 2598-3172.
- Arfan Ikhsan, 1979-; Herkulanus Bambang Suprasto. (2008.). Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma / Arfan Ikhsan, Herkulanus Bambang Suprasto. Yogyakarta :: Graha Ilmu,.
- Ayem, S. (2021). Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi, Religiusitas, Dan Gender Terhadap Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Akurat/ Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(2), 150-164.
- Betty Jane Punnett, David A. Ricks (1997), *International Business Blackwell Business*. Blackwell.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), H. 99

- Conella, M., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Retaliasi Dan Power Distance Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3642-3655.
- Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-4 (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), 69.
- Depag Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama, 2010), 911.
- Dradjat, Ilmu., 132.
- Erna Yunus B. 2022, 15 Januari . Tiga Kepala Daerah Di Jateng Dilaporkan Ke Kpk Dugaan Korupsi. <https://www.rmoljawatengah.id/tiga-kepala-daerah-di-jateng-dilaporkan-ke-kpk-dugaan-korupsi>. (Diakses Pada, September, 13-2023)
- Fidayanti, Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam (Bandung: Psymphatic, Juni 2015), Vol. 2, No. 2, 199.
- Firmansyah, Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas Pasien Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kesehatan, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 13.
- Ghozali, Imam (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. 21 Update Pls Regresi. Semarang: Badan Penerbit Uni Versitas. Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hidayah Marsal, 2008.
- Hofstede G. (1983). The Cultural Relativity Of Organizational Practices And Theories. *Journal Of International Business Studies*, 14, 75-89.
- Hofstede G. (1983). The Cultural Relativity Of Organizational Practices And Theories. *Journal Of International Business Studies*, 14, 75-89.
- Husniati, S., Hardi, H., & Wiguna, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing Internal (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral Dissertation, Riau University).

Imam Ghozali Haji. (2009.). Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program Spss / H. Imam Ghozali. Semarang :: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.

Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Pengaruh Sikap Ke Arah Perilaku, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Atas Perilaku Terhadap Niat Dan Perilaku *Whistleblowing* Cpn (The Influence Of Attitude Toward The Behavior, Subjective Norms, And Perceived Behavioral Kontrol On *Whistleblowing* Intention And Behavior Of Cpn). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 4, 63-84.

Kompas.Com, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblowing*",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/24/02000031/perlindungan-hukum-terhadap-whistleblowing>. Penulis : Issha Harruma

Kumar, M., & Santoro, D. (2017). A Justification Of *Whistleblowing*. Philosophy & Social Criticism, 43, 669-684.

Latif, N. (2009). Hubungan Nilai Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Bank Syariah. Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 18(2).

Malkan, M., Adam, Y., Syafaat, M., & Sofyan, S. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Mandiri Kcp Palu Imam Bonjol. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 2(1), 106-121.

Miceli, M. P., Near, J. P., Dan Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-Blowing In Organizations*. New York: Routledge

Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Lilik. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.

Najela, Nadia Tettyavi (2019) Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Sebagai Penentu Niat Beli Ulang Pada Konsumen Klinik Kecantikan Auraku Skin Solution Kota Cimahi. Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Natawibawa, I. W. Y., Irianto G., & Roekhudin, R. (2018). Theory Of Reasoned Action Sebagai

- Prediktor Whistleblowing Intention Pengelola Keuangan di Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 310-319.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndruru, Y. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Tanimas Soap Industri Medan (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).
- Pangestu, F., & Rahajeng, D. K. (2020). The Effect Of *Power Distance*, Moral Intensity, And Professional Commitment On Whistleblowing Decisions. *Journal Of Indonesian Economy And Business: Jieb.*, 35(2), 144-162.
- Parianti, N. P. I., Suartana, I. W., & Badera, I. D. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Dan Perilaku *Whistleblowing* Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4209-4236
- Park, H. And Blenkinsopp, J. 2009. Whistle-Blowing As Planned Behavior – A Survey Of South Korean Police Officers. *Journal Of Business Ethics*, Vol. 85, Pp. 545-556.
- Perdana, A. A., Hasan, A., & Rasuli, M. (2018). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Etika Terhadap *Whistleblowing* Intention Dan Perilaku *Whistleblowing* (Studi Empiris Di Bpkp Perwakilan Riau Dan Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 89-98.
- Pratiwi, H. E., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Sifat Machiavellian Dan *Power Distance* Terhadap Keputusan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2185-2199.
- Pratiwi, H. E., & Dwita, S. (2020). Pengaruh Sifat Machiavellian Dan Power Distance Terhadap Keputusan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2185-2199.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2010), *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Pruyser, P. W. (1976). *The Minister As Diagnostician: Personal Problems In Pastoral Perspective*.
- Puni, A., & Hilton, S. K. (2020). *Power Distance* Culture And Whistleblowing Intentions: The Moderating Effect Of Gender. *International Journal Of Ethics And Systems*, 36(2), 217-234.
- Putri, C. M. (2016). Pengaruh Jalur Pelaporan Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Niat Seseorang Melakukan *Whistleblowing*. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(1), 42-52.

- Rahayu, W. N. (2018). Pengaruh Sikap, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Niat Whistleblowing Eksternal-Internal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (BachelorSs Thesis, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).
- Rahayu, W. N. (2018). *Pengaruh Sikap, Persepsi Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Niat Whistleblowing Eksternal-Internal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi* (BachelorSs Thesis, Fak. Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).
- Rakhmat, Jalaludin. (2015). Psikologi Komunikasi. Bandung: Pt. Remaja. Rosdakarya Offset.
- Rodiansah, A. H. (2020). Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ros Mayasari, Religiusitas Islam Dan Kebahagiaan (Al-Munzir: November 2014), Vol. 7, No. 2, 85
- Ryan, J. C., & Tipu, S. A. (2013). Leadership Effects On Innovation Propensity: A Two-Factor Full Range Leadership Model. *Journal Of Business Research*, 66(10), 2116-2129.
- Sanjaya, R. D., Pratami, L. A., Rizky, M., Permata, P. M., & Rahmayanti, R. (2022). The Effect Of Delegative Leadership Style and Non-Physical Work Environment On Employee Performance On Cv Wirasandi.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat *Whistleblowing* Internal-Eksternal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 209-219.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal Dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal Of Accounting And Investment*, 17(2), 209-219.
- Semendawai, Abdul Haris, Et.Al, 2011, Memahami Whistle Blower , Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Setiawan, G. N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblowing* Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 332-336
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, N.D.).
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*. Bandung :: Alfabeta,.
- Sugiyono. (2014.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,Cv.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Pt. Rineka Cipta, Cet. Xiv, Jakarta, 2010), H. 173
- Supriyono, R.A., 1950- (Penulis); Mash (Korektor). (2017; © 2017). *Akuntansi Keperilakuan / Penulis, R.A. Supriyono; Korektor, Mash*. Yogyakarta:: Gadjah Mada University Press,.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- Su3nchi, Georgiana. 2012. Internal Audit And Whistle-Blowing. *Economics, Management, And Financial Markets*. Vol. 7(4): 415-421.
- Su3nschi, Georgiana. 2012. Internal Audit And Whistle-Blowing. *Economics, Management, And Financial Markets*. 7(4): 415–421.
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama* (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2003), 13
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- UD3n Dan Akbar Purnomo Setiady. 2008. *Pengantar Statistika*.
- UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Wijayanto, Ridwan Zachrie. (2010). “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab,. Akibat, Dan Prospek Pemberantasan”. Jakarta: Gramedia. Yuhertiana, I. (2003).
- Wikamorys, Dian Anggraini., Thini Nurul Rochmach., 2017, “Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Untuk Melakukan Operasi Katarak”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (Semarang: Al-Waah, 2004), 259

Yudha, D. D. G., & Rizal, M. (2018). Gender, Religiosity, Positive Mood And Whistleblowing Intention. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 73(1), 117-123.

Yuni Fitriani, Religiusitas Islam Dan Kerendahan Hati Dengan Pemanfaatan Pada Mahasiswa (Riau: *Jurnal Psikologi*, Desember 2018), Vol. 14, No. 2, 167

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 130

Zulfikri, A. (2022). Whistleblowing System Dalam Akuntansi: Tinjauan Studi Tentang Penentu Whistleblowing Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 1(01), 49-56.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Responden

ANGKET UJI COBA INSTRUMEN

Saya Debora Ananda Krisnawan mahasiswi Progam Studi Akuntansi SyariSah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang saat ini sedang melakukan riset dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat gelar Sarjana Strata S.1, dalam kesempatan ini saya mengkaji terkait keputusan melakukan whistleblowing dengan judul “Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan Power Distance Terhadap Keputusan Whistleblowing” Dengan ini saya memohon kesediaan para staff Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner saya.

DATA IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Lama bekerja : 1-3 Tahun 5 tahun
 3-5 Tahun > 6 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
- Pendidikan terakhir : SD dan Sederajat D1-D3
 SMP dan Sederajat S1-S3
 D3 dan Sederajat
- Usia : < 20 tahun 30-35 tahun
 20-25 tahun > 35 tahun
 25-30 tahun

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk mengisi identitas responden yang telah disediakan
2. Pada pengisian pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, bapak/ibu cukup memberikan tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang sudah tersedia sesuai pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Setiap pertanyaan diharapkan memberikan satu jawaban. Skala yang digunakan sebagai berikut :

Keterangan :

Simbol	Kriteria	Bobot
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Tidak Setuju	5

Persepsi Kontrol Perilaku (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tempat kerja akan mengabaikan laporan kecurangan yang saya buat jika melapor					
2.	Ketika melaporkan tindak kecurangan, saya akan mendapatkan pandangan negatif di tempat kerja.					
3.	Jika saya melaporkan tindak kecurangan yang ada di tempat kerja saya, saya akan mendapat kesulitan saat bekerja.					
4.	Laporan yang saya buat tentang kecurangan di tempat kerja, tidak akan merubah apapun pada tempat kerja saya.					
5.	Pelaku tindakan kecurangan yang juga rekan saya akan melakukan balas dendam terhadap saya yang melaporkan.					

Religiusitas (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya cukup sering melakukan literasi perihal keagamaan					
2.	Saya memberikan kontribusi finansial terhadap organisasi keagamaan saya					
3.	Saya memiliki waktu tersendiri untuk memperdalam keimanan saya					
4.	Menurut saya, agama adalah jawaban dari semua permasalahan hidup saya					

5.	Menurut saya, tingkat keimanan seseorang dapat dinilai dari perilakunya					
6.	Melakukan pelaporan kecurangan adalah hal yang saya lakukan karena agama					
7.	Saya senang menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman saya di organisasi keagamaan saya					
8.	Keyakinan saya mempengaruhi bagaimana tindakan saya					

Power Distance (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan berpengaruh terhadap pelaporan kecurangan					
2.	Keterlibatan atasan dalam pembuatan keputusan berpengaruh terhadap pelaporan kecurangan					
3.	Penggunaan otoritas atasan sangat berpengaruh terhadap keputusan melakukan pelaporan kecurangan					
4.	Keterbukaan kepemimpinan berpengaruh terhadap keputusan melakukan pelaporan kecurangan					
5.	Tingkah laku dan sikap atasan berpengaruh terhadap keputusan melakukan pelaporan kecurangan					
6.	Perintah atasan berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan pelaporan kecurangan					
7.	Pendelegasian tugas atau wewenang berpengaruh terhadap pelaporan kecurangan					

8.	Komunikasi antar atasan dan bawahan berpengaruh terhadap pelaporan kecurangan					
----	---	--	--	--	--	--

Keputusan Melakukan Whistleblowing (Pelaporan Kecurangan) (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Apabila mengetahui sebuah tindakan kecurangan/korupsi, Saya akan melaporkan kepada pihak berwenang.					
2.	Apabila Saya mengetahui sebuah tindakan kecurangan/korupsi, Saya akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak berwenang.					
3.	Apabila mengetahui sebuah tindakan kecurangan/korupsi, Saya akan memberitahukan kepada publik..					
4.	Apabila mengetahui sebuah tindakan kecurangan/korupsi, Saya akan melaporkan kepada atasan atau manajemen yang lebih tinggi.					
5.	Saya akan memberi informasi mengenai kecurangan/korupsi yang terjadi kepada pengawas internal di tempat saya bekerja					

Lampiran 2: Hasil Jawaban Angket

Persepsi Kontrol Perilaku (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1 TOTAL
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
5	4	4	5	5	23
5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	4	19
5	5	4	4	3	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	3	18
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	3	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	5	24
5	5	5	3	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20

Religiusitas (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2_TOTAL
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	5	4	4	33
5	4	4	4	4	5	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	2	1	3	3	4	1	3	21
4	5	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	5	4	4	5	35
4	5	5	4	4	4	5	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	5	4	4	4	5	4	35
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	3	3	3	3	4	3	3	26
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	5	4	4	5	35
5	4	5	5	5	5	5	5	39
4	4	4	5	5	4	4	5	35
4	4	4	2	2	4	4	2	26
5	5	5	5	5	4	5	5	39
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	3	3	5	4	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	3	5	5	4	3	5	34

Power Distance (X3)

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3_TOTAL
4	5	5	5	4	4	5	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	4	4	5	5	37
4	5	5	5	5	4	5	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40

5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	4	4	4	4	2	4	4	29
5	4	4	4	4	5	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	5	4	4	33
4	4	4	4	5	4	4	4	33
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	5	5	5	4	5	5	38
3	4	4	4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	5	5	4	4	34
4	5	4	4	4	4	4	4	33
4	3	3	3	4	4	3	3	27
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	5	4	4	4	32

Keputusan Melakukan Wishtleblowing (Y)

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y_TOTAL
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
5	4	4	5	5	23
5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	4	19
5	5	4	4	3	21
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	3	18
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	3	4	20
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	5	24
5	5	5	3	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20

Lampiran 3: Data Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	30	29.4	29.4	29.4
	Wanita	72	70.6	70.6	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Posisi Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karyawan	25	24.5	24.5	24.5
	staff	77	75.5	75.5	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 tahun	60	58.8	58.8	58.8
	10 - 20 Tahun	17	16.7	16.7	75.5
	5 - 10 Tahun	25	24.5	24.5	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	37	36.3	36.3	36.3
	S2	40	39.2	39.2	75.5
	D3	25	24.5	24.5	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Statistics

		Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	Religiusitas (X2)	Power Distance (X3)	Keputusan Whistleblowing (Y)
N	Valid	102	102	102	102
	Missing	0	0	0	0
Mean		20.5686	33.5098	32.3431	20.8235
Median		20.0000	33.0000	32.0000	21.0000
Std. Deviation		2.13184	3.64446	4.43991	1.78781
Minimum		15.00	21.00	20.00	17.00
Maximum		25.00	40.00	40.00	25.00
Sum		2098.00	3418.00	3299.00	2124.00

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	102	15.00	25.00	2098.00	20.5686	2.13184
Religiusitas (X2)	102	21.00	40.00	3418.00	33.5098	3.64446
Power Distance (X3)	102	20.00	40.00	3299.00	32.3431	4.43991
Keputusan Whistleblowing (Y)	102	17.00	25.00	2124.00	20.8235	1.78781
Valid N (listwise)	102					

Lampiran 4: Uji Validitas dan Realibilitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	.760**	.569**	.480**	.522**	.856**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.007	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.760**	1	.590**	.230	.396*	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.221	.030	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.569**	.590**	1	.365*	.547**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.047	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.480**	.230	.365*	1	.534**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.007	.221	.047		.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.522**	.396*	.547**	.534**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.003	.030	.002	.002		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	Pearson Correlation	.856**	.768**	.794**	.678**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Religiusitas (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	.400*	.378*	.545**	.545**	.524**	.378*	.545**	.646**
	Sig. (2-tailed)		.029	.040	.002	.002	.003	.040	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.400*	1	.895**	.511**	.511**	.286	.895**	.511**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.029		.000	.004	.004	.126	.000	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X2.3	Pearson Correlation	.378*	.895**	1	.489**	.489**	.378*	1.000**	.489**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.040	.000		.006	.006	.040	.000	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.545**	.511**	.489**	1	1.000**	.248	.489**	1.000**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	.006		.000	.187	.006	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.545**	.511**	.489**	1.000**	1	.248	.489**	1.000**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	.006	.000		.187	.006	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.524**	.286	.378*	.248	.248	1	.378*	.248	.475**
	Sig. (2-tailed)	.003	.126	.040	.187	.187		.040	.187	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	.378*	.895**	1.000**	.489**	.489**	.378*	1	.489**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.040	.000	.000	.006	.006	.040		.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	.545**	.511**	.489**	1.000**	1.000**	.248	.489**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	.006	.000	.000	.187	.006		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Religiusitas (X2)	Pearson Correlation	.646**	.820**	.839**	.861**	.861**	.475**	.839**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Power Distance (X3)
X3.1	Pearson Correlation	1	.412*	.537**	.537**	.419*	.632**	.537**	.537**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.024	.002	.002	.021	.000	.002	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X3.2	Pearson Correlation	.412*	1	.864**	.864**	.426*	.299	.864**	.864**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.024		.000	.000	.019	.108	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.537**	.864**	1	1.000**	.572**	.299	1.000**	1.000**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.001	.108	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.537**	.864**	1.000**	1	.572**	.299	1.000**	1.000**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.001	.108	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.419*	.426*	.572**	.572**	1	.400*	.572**	.572**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.021	.019	.001	.001		.029	.001	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.632**	.299	.299	.299	.400*	1	.299	.299	.568**
	Sig. (2-tailed)	.000	.108	.108	.108	.029		.108	.108	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.7	Pearson Correlation	.537**	.864**	1.000**	1.000**	.572**	.299	1	1.000**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.001	.108		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.8	Pearson Correlation	.537**	.864**	1.000**	1.000**	.572**	.299	1.000**	1	.942**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.001	.108	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Power Distance (X3)	Pearson Correlation	.718**	.842**	.942**	.942**	.683**	.568**	.942**	.942**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Keputusan Whistleblowing (Y)
Y1	Pearson Correlation	1	.760**	.569**	.480**	.522**	.856**

	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.007	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.760**	1	.590**	.230	.396*	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.221	.030	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.569**	.590**	1	.365*	.547**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.047	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.480**	.230	.365*	1	.534**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.007	.221	.047		.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.522**	.396*	.547**	.534**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.003	.030	.002	.002		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Keputusan Whistleblowing (Y)	Pearson Correlation	.856**	.768**	.794**	.678**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.831	5

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.910	8

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	8

Y

Reliability Statistics

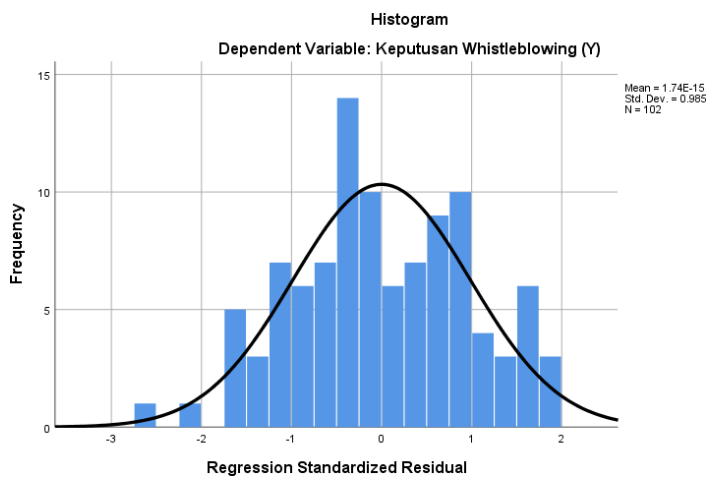
Cronbach's Alpha	N of Items
.831	5

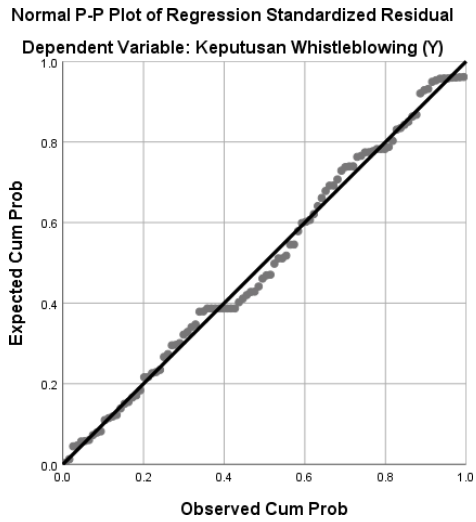
Lampiran 5: Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90791316
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.046
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

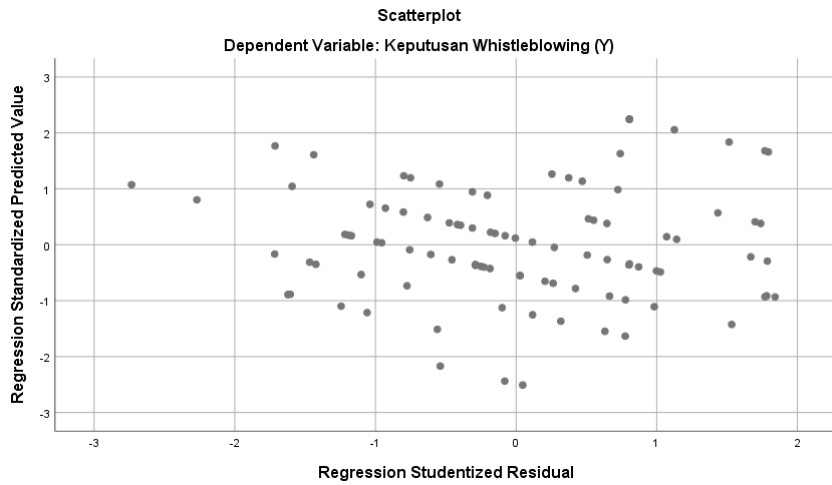




Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.200	1.019		4.123	.000		
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	.290	.050	.346	5.774	.000	.732	1.366
	Religiusitas (X2)	.243	.033	.496	7.310	.000	.573	1.746
	Power Distance (X3)	.077	.028	.192	2.792	.006	.554	1.804

a. Dependent Variable: Keputusan Whistleblowing (Y)



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.435	.573		-.759	.450
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	-.007	.028	-.027	-.236	.814
	Religiusitas (X2)	.035	.019	.245	1.898	.061
	Power Distance (X3)	.004	.016	.031	.233	.816

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 6: Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis

		Coefficients^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4.200	1.019		4.123	.000			
	Persepsi Kontrol Perilaku (X1)	.290	.050	.346	5.774	.000	.732	1.366	
	Religiusitas (X2)	.243	.033	.496	7.310	.000	.573	1.746	
	Power Distance (X3)	.077	.028	.192	2.792	.006	.554	1.804	

a. Dependent Variable: Keputusan Whistleblowing (Y)

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	239.569	3	79.856	93.999	.000 ^b
	Residual	83.255	98	.850		
	Total	322.824	101			

a. Dependent Variable: Keputusan *Whistleblowing* (Y)

b. Predictors: (Constant), *Power Distance* (X3), Persepsi Kontrol Perilaku (X1) , Religiusitas (X2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.742	.734	.92171

a. Predictors: (Constant), *Power Distance* (X3), Persepsi Kontrol Perilaku (X1) , Religiusitas (X2)

b. Dependent Variable: Keputusan *Whistleblowing* (Y)

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 2037/Un.10.5/D1/PG.00.00/06/2023

07 Juni 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Riset / Penelitian

Yth.

Subbag Administrasi Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada:

Nama : DEBORA ANANDA KRISNAWAN
NIM : 1905046011
Semester : VIII (2022/2023)
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti : Jl. Karonsih VI No. 585, Ngaliyan, Semarang Barat
Tujuan Penelitian : Untuk mendapatkan informasi/data guna menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, RELIGIUSITAS DAN POWER DISTANCE TERHADAP KEPUTUSAN WHISTLEBLOWING DALAM PENCEGAHAN FRAUD
Waktu Penelitian : 12 Juni 2023
Lokasi Penelitian : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
JI Pemuda 127-133 Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

NUR FATONI
NUR FATONI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran 8: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. (024) 3514351
SEMARANG 50132
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 425/ 1008 /1.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

No	NAMA	Jurusan / Prodi
1	Debora Ananda Krisnawan	Akuntansi Syariah

Telah melakukan Penelitian di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Judul Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Religiusitas dan Power Distance Terhadap Keputusan Melakukan Whistleblowing dalam Pencegahan Fraud pada bulan Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Agustus2023

a.n. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris
u.p

Kasub Bag Administrasi dan Umum

SRI RAHAYUNINGSIH, SE, MM

Pembina (IV/a)
NIP. 196711131991102001

Lampiran 9: Dokumentasi



Daftar Riwayat Hidup

Nama: Debora Ananda Krisnawan

Jenis Kelamin: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir: Denpasar, 03 Desember 2000

Status: Belum menikah

Agama: Islam

Alamat: Jl. Hayam Wuruk Gg. Sekuno 8 No. 150, Denpasar Timur, Bali.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 27 PEMECUTAN DENPASAR (2007-2013)
2. SMP MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR (2013-2016)
3. MAN 1 Jembrana (2016-2019)
4. S1 Akuntansi Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 September 2023

Debora Ananda Krisnawan